

**REPRESI POLITIK DALAM NOVEL *LAUT BERCERITA*
KARYA LAILA S. CHUDORI
DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA**

TESIS

**OLEH
NURUL KHOLIFAH
22302071016**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
2025**

**REPRESI POLITIK DALAM NOVEL *LAUT BERCERITA*
KARYA LAILA S. CHUDORI
DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA**

TESIS

**Diajukan Kepada Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**



**OLEH
NURUL KHOLIFAH
22302071016**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
2025**

ABSTRAK

Kholifah, Nurul. 2025. *Represi Politik Dalam Novel Laut Bercerita Karya Laila S. Chudori dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra*. Tesis Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Pembimbing 1: Dr. Hasan Busri, M.Pd. Pembimbing 2: Dr. Sri Wahyuni, M.Pd.

Kata Kunci: Represi Politik, Novel Laut Bercerita, Pembelajaran Sastra

Karya sastra merupakan manifestasi kompleks dari realitas sosial yang mencerminkan berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dimensi politik yang sering kali melahirkan kritik terhadap struktur kekuasaan yang dominan. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Salah satu karya sastra yang mengangkat isu represi politik adalah novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, yang menggambarkan peristiwa penculikan aktivis pada masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana represi politik digambarkan dalam novel ini serta implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana novel tersebut menggambarkan bentuk-bentuk represi politik dan perlawanan terhadap tirani yang ada, serta menggali implikasinya dalam pembelajaran sastra. Dalam pembelajaran sastra, karya ini berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran kritis siswa terhadap sejarah politik dan hak asasi manusia, serta untuk memperkenalkan mereka pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi untuk menggali represi politik dalam novel, mengidentifikasi pola-pola kekerasan fisik, serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan oleh represi negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi novel ini dalam pembelajaran sastra di sekolah, dengan menyoroti bagaimana novel dapat membantu membentuk pemahaman kritis terhadap isu-isu sosial dan politik di kalangan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel ini berhasil menggambarkan berbagai bentuk represi politik, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa *Laut Bercerita* memiliki potensi besar dalam pembelajaran sastra, karena dapat memperkenalkan siswa pada isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan perlawanan terhadap tirani. Oleh karena itu, novel ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sastra Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang membentuk karakter siswa melalui pengembangan literasi kritis dan kesadaran sosial-politik.

ABSTRACT

Kholifah, Nurul. 2025. Political Repression in *Laut Bercerita* by Laila S. Chudori and Its Implications for Literature Education. Master's Thesis in Indonesian Language Education, Faculty of Teacher Training and Education. Advisor 1: Dr. Hasan Busri, M.Pd. Advisor 2: Dr. Sri Wahyuni, M.Pd.

Keywords: Political Repression, *Laut Bercerita*, Literature Education

Literary works are complex expressions of social reality that reflect various aspects of human life, including the political dimension, which often gives rise to critiques of dominant power structures. Literature serves not only as entertainment but also as a medium for voicing resistance against social and political injustices. One literary work that addresses the issue of political repression is the novel *Laut Bercerita* by Leila S. Chudori, which portrays the abduction of activists during the New Order era. This study aims to analyze how political repression is depicted in the novel and its implications for literature education in schools.

The primary focus of this research is to analyze how the novel portrays various forms of political repression and resistance against tyranny, as well as to explore its implications for literature education. In the context of literature education, this work serves as a tool to develop students' critical awareness of political history and human rights, while also introducing them to the values of humanity and democracy.

The research methodology used is a qualitative approach with content analysis to uncover political repression in the novel, identify patterns of physical violence, and examine the social impacts caused by state repression. Furthermore, this study also examines the relevance of this novel in school literature education, emphasizing how it can help shape critical understanding of social and political issues among students.

The research findings reveal that the novel effectively depicts various forms of political repression, including arbitrary arrests, torture, and forced disappearances. These findings also suggest that *Laut Bercerita* holds significant potential in literature education, as it can introduce students to important issues such as human rights, freedom of expression, and resistance against tyranny. Therefore, this novel not only enriches the understanding of Indonesian literature but also serves as an educational instrument that shapes students' character through the development of critical literacy and social-political awareness.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan: (1) Konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) asumsi penelitian, (5) kegunaan penelitian, (6) penegasan istilah. Berikut ini adalah perincian dari sub-sub bagian tersebut.

1.1 Konteks Penelitian

Karya sastra merupakan manifestasi kompleks dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus menjadi cerminan berbagai dimensi kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sayuti, 2017) dan (Adi, 2019), eksistensi karya sastra tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya, karena setiap karya lahir dari rahim zamannya sendiri. Prodopo (2020) memperdalam pemahaman ini dengan menyatakan bahwa karya sastra bukan sekadar refleksi pasif, melainkan realitas sosial yang aktif, di dalamnya terjalin kompleksitas berbagai kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Jabrohim (2021) yang menegaskan bahwa sastra sebagai institusi sosial memiliki keterkaitan erat dengan dimensi politik, sebab di dalamnya terkandung berbagai bentuk dominasi, resistensi, dan negosiasi kekuasaan yang mencerminkan dinamika masyarakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Kusmayanti (2018) menggarisbawahi fungsi strategis sastra sebagai media kritik sosial dan instrumen perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan. Melalui karya sastra, para penulis memiliki kekuatan untuk menyuarakan perspektif-perspektif alternatif dan mengkritisi berbagai bentuk ketidakadilan serta pelanggaran hak-hak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis terhadap karya sastra tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek di luar teks, termasuk konteks historis, politis, dan budaya yang melatarbelakanginya. Faruk (2022) menambahkan bahwa karya sastra dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif ketika mampu menghadirkan kesadaran kritis pembaca terhadap realitas sosial yang ada. Dengan demikian, karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai medium transformasi sosial yang memiliki daya pengaruh signifikan dalam membentuk cara pandang dan kesadaran masyarakat.

Lebih jauh lagi, kompleksitas hubungan antara sastra dan politik semakin terlihat jelas dalam berbagai kajian teoretis kontemporer. Eagleton (2016) dan Tyson (2015) mengemukakan bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik, karena pada

hakikatnya setiap karya sastra merupakan produk dari ideologi dan struktur kekuasaan tertentu yang berlaku pada zamannya. Pandangan ini diperkuat oleh Goldmann (2016) yang menyoroti karya sastra sebagai gambaran kesadaran kolektif suatu kelompok masyarakat, di mana di dalamnya tercermin berbagai kepentingan dan relasi kuasa yang kompleks. Bressler (2015) memberikan penegasan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa "sastra adalah produk ideologi tertentu, yang tidak dapat dipisahkan dari politik," sebuah perspektif yang menunjukkan keterkaitan intrinsik antara kreasi sastra dan konteks politiknya.

Dalam ranah yang lebih praktis, Swingewood (2017) menguraikan bahwa "sastra selalu terlibat dalam diskursus politik, baik secara eksplisit maupun implisit," sebuah observasi yang menggambarkan bagaimana karya sastra senantiasa berada dalam pusaran dinamika politik masyarakat. Makaryk (2016) memperluas pemahaman ini dengan menjelaskan fungsi strategis karya sastra sebagai media kritik sosial dan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan. Williams (2023) menambahkan bahwa dalam konteks kontemporer, karya sastra bahkan telah berkembang menjadi instrumen yang lebih kompleks dalam mengungkap dan menantang berbagai bentuk ketidakadilan sosial, politik, dan kultural yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, relasi antara sastra dan politik bukan sekadar hubungan superfisial, melainkan sebuah jalinan kompleks yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan perjuangan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks hubungan sastra dan politik tersebut, fenomena represi politik muncul sebagai salah satu manifestasi paling nyata dari relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Represi politik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan penekanan dan pembungkaman sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor-aktor yang memiliki afiliasi dengannya terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Represi adalah ancaman untuk dapat menundukkan seseorang dengan kekuatan institusional atau fisik (Ferizal, 2024). Drakos and Gofas (2016) mengidentifikasi berbagai bentuk represi politik, mulai dari penangkapan, penahanan, penyiksaan, hingga pembatasan kebebasan berekspresi dan berserikat terhadap mereka yang dianggap sebagai oposisi atau suara-suara kritis dalam masyarakat.

Ritter and Conrad (2016) dalam kajian komprehensif mereka mengungkapkan bahwa praktik represi politik tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia secara langsung, tetapi juga memiliki efek domino yang dapat memicu eskalasi penolakan dan perlawanan dari masyarakat. Fenomena ini menciptakan apa yang mereka sebut sebagai "spiral kekerasan" - sebuah siklus represif yang sulit diputus karena setiap tindakan represi justru melahirkan bentuk-bentuk resistensi baru yang semakin intensif. Henderson (2019) menambahkan bahwa dalam konteks seperti ini, karya sastra seringkali menjadi salah satu

medium perlawanan yang paling efektif, karena kemampuannya untuk menyampaikan kritik sosial-politik secara terselubung melalui metafora dan simbolisme. Dengan demikian, semakin represif sebuah rezim, paradoksalnya justru semakin mendorong munculnya karya-karya sastra yang lebih kritis dan subversif sebagai bentuk perlawanan terhadap opresi yang ada.

Sejalan dengan represi politik yang terjadi di Indonesia juga mempengaruhi penulisan karya sastra yang sesuai dengan zamannya. Dalam perkembangannya, sastra Indonesia telah menghasilkan banyak karya yang mengangkat tema politik dan kekuasaan. Pramoedya Ananta Toer dengan tetralogi Burunya, Umar Kayam dengan Para Priyayi, dan Ahmad Tohari dengan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk adalah beberapa contoh karya sastra yang berhasil menghadirkan kritik terhadap struktur kekuasaan yang represif. Novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori melanjutkan tradisi ini dengan mengangkat isu represi politik yang terjadi pada masa Orde Baru, khususnya peristiwa penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1997-1998.

Novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang mendapat banyak pengakuan dan penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Novel ini telah memenangkan Southeast Asian Writers Award pada tahun 2013 dan dinominasikan untuk International Dublin Literary Award pada tahun 2014. Di dalam negeri, novel ini juga meraih Anugerah Sastra Khatulistiwa pada tahun 2013 serta terpilih sebagai "Buku Terbaik" versi majalah Tempo pada tahun 2012. Selain itu, *Laut Bercerita* juga mendapat Anugerah Sastra dari Yayasan Buku Utama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Kelebihan novel ini terletak pada kualitas penulisannya yang dianggap salah satu karya sastra Indonesia terbaik, dengan kedalaman analisis, ketajaman pengamatan sosial-politik, serta penggunaan bahasa yang indah dan puitis.

Novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori merupakan salah satu contoh karya sastra yang mengangkat isu represi politik. Seperti yang dikatakan Chudori (2024), "novel ini berangkat dari kehidupan dan pengalaman orang-orang yang hidup di masa Orde Baru, saat mereka harus berjuang untuk mempertahankan identitas dan harkat mereka di tengah iklim politik yang penuh dengan ketakutan." Novel ini menceritakan tentang pengalaman tokoh-tokohnya yang hidup di tengah iklim politik yang tidak stabil dan penuh ketakutan di masa Orde Baru. Melalui novel ini, Laila S. Chudori berusaha mengungkapkan berbagai bentuk represi politik yang dialami oleh individu-individu yang dianggap "berbahaya" bagi rezim Orde Baru saat itu.

Represi politik yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita* mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengawasan, penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa. Seperti yang dikatakan Budiawan (2018), "rezim Orde Baru tidak hanya menekan individu yang dianggap 'subversif', tetapi juga berusaha menghancurkan jaringan sosial dan dukungan bagi mereka." Bentuk-bentuk represi tersebut tidak hanya dialami oleh tokoh-tokoh utama, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rezim Orde Baru tidak hanya menekan individu yang dianggap "subversif", tetapi juga berusaha menghancurkan jaringan sosial dan dukungan bagi mereka. Selain itu, novel *Laut Bercerita* juga menggambarkan bagaimana represi politik tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Seperti yang dikatakan Heryanto (2014), "trauma dan rasa takut yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel tersebut tidak hanya terbatas pada masa-masa represi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari." Hal ini menunjukkan bahwa represi politik memiliki dampak jangka panjang yang sulit dihilangkan.

Dalam konteks pembelajaran sastra, novel *Laut Bercerita* memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmanto (2018), "Pembelajaran sastra harus mampu membentuk karakter peserta didik dan mengembangkan kepekaan sosial mereka terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat." Novel ini tidak hanya mengajarkan tentang aspek intrinsik karya sastra seperti alur, tokoh, dan latar, tetapi juga memberikan pemahaman tentang sejarah politik Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pembelajaran sastra di sekolah saat ini masih cenderung terfokus pada aspek teoretis dan kurang mengembangkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mengapresiasi karya sastra secara kritis. Seperti yang diungkapkan oleh Endraswara (2021: 78), "Pembelajaran sastra seharusnya tidak hanya berkutat pada pengenalan istilah-istilah sastra, tetapi juga harus mampu mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai sosial, politik, dan kemanusiaan yang terkandung dalam karya sastra." Dalam hal ini, novel *Laut Bercerita* dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengembangkan pembelajaran sastra yang lebih bermakna.

Novel ini menghadirkan narasi yang kuat tentang perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Seperti yang terungkap dalam kutipan: "Kami berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang tak mampu bersuara, untuk mereka yang terbungkam oleh ketakutan" (Chudori, 2024:156). Kutipan ini menunjukkan bagaimana novel tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya memperjuangkan keadilan kepada peserta didik.

Pembelajaran sastra melalui novel yang mengangkat tema represi politik seperti *Laut Bercerita* juga dapat membantu peserta didik memahami sejarah bangsanya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2019: 32), "Karya sastra dapat menjadi jendela untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin tidak tercatat dalam buku-buku sejarah resmi." Melalui novel ini, peserta didik dapat belajar tentang periode kelam dalam sejarah Indonesia dan memahami pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Novel *Laut Bercerita* juga menghadirkan dimensi pembelajaran yang penting terkait dengan trauma kolektif dan ingatan sosial. Seperti yang diungkapkan dalam novel: "Luka ini bukan hanya milik kami yang kehilangan, tapi juga milik bangsa yang membiarkan anak-anaknya hilang tanpa jejak" (Chudori, 2024:378). Kutipan ini menunjukkan bagaimana karya sastra dapat menjadi medium untuk memahami trauma kolektif dan pentingnya mengingat sejarah agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk represi politik yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori serta implikasinya dalam pembelajaran sastra di sekolah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, khususnya dalam mengkaji hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial, politik, dan budaya di mana karya tersebut diciptakan. Seperti yang dikatakan Ratna (2023), "penelitian sastra dengan pendekatan sosiologi sastra berusaha mengungkapkan keterkaitan karya sastra dengan masyarakat, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya."

Salah satu alasan pemilihan novel *Laut Bercerita* sebagai objek penelitian adalah karena novel ini merupakan salah satu karya sastra kontemporer yang telah mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing dan mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Khatulistiwa Literary Award pada tahun 2013. Seperti yang dikatakan Faruk (2022), "pemilihan karya sastra kontemporer sebagai objek penelitian penting dilakukan untuk memahami isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa novel ini tidak hanya memiliki kualitas sastra yang baik, tetapi juga memiliki relevansi sosial dan politik yang kuat.

Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena isu represi politik masih menjadi topik yang relevan dan aktual di Indonesia, terutama dalam konteks pembelajaran sastra di sekolah. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk represi politik dan dampaknya dapat membantu siswa untuk lebih kritis dalam memahami karya sastra, khususnya novel, serta menyadari pentingnya perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Seperti yang dikatakan Thung (2017), "pembelajaran sastra yang mengkaji isu-isu sosial dan politik dapat membantu siswa untuk menjadi warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab."

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Studi yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) dengan judul "Resistensi terhadap Kekuasaan dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari: Analisis Wacana Kritis" mengkaji bentuk-bentuk perlawanan terhadap dominasi politik dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Entrok menghadirkan berbagai bentuk resistensi, mulai dari perlawanan individual hingga kolektif, terhadap sistem kekuasaan yang represif. Pratiwi mengungkapkan bahwa "Novel ini tidak hanya berbicara tentang perlawanan terhadap represi politik, tetapi juga terhadap dominasi patriarki dan dogma agama yang rigid."

Kajian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) berjudul "Politik Identitas dalam Novel Gentayangan Karya Intan Paramaditha: Perspektif Poskolonial" mengungkap bagaimana novel tersebut mengeksplorasi isu-isu identitas dan kekuasaan dalam konteks global. Penelitian ini menunjukkan bahwa novel Gentayangan menghadirkan kritik terhadap politik identitas dan mobilitas global yang timpang. Seperti dinyatakan dalam penelitian, "Novel ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana politik identitas beroperasi dalam konteks globalisasi dan post-nasionalisme."

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan tentang represi politik dalam novel *Laut Bercerita*. Pertama, dari segi objek material, penelitian ini secara khusus mengkaji novel *Laut Bercerita* yang mengangkat isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada periode akhir Orde Baru, sebuah tema yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Novel ini memberikan perspektif unik tentang represi politik karena ditulis berdasarkan penelitian mendalam dan kesaksian para korban serta keluarga korban penghilangan paksa.

Kedua, dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan kajian sosiologi sastra dan teori kekuasaan Michael Foucault untuk mengungkap bagaimana represi politik direpresentasikan dalam novel. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan satu pendekatan teoretis saja. Penggunaan dua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana kekuasaan dan resistensi beroperasi dalam teks sastra.

Ketiga, penelitian ini juga mengkaji bagaimana novel *Laut Bercerita* dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan literasi kritis siswa dalam konteks pembelajaran sastra.

Aspek ini belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek apresiasi sastra atau pemahaman nilai-nilai sosial secara umum.

Pengembangan literasi kritis melalui pembelajaran sastra menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini dan informasi yang masif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian sastra Indonesia, khususnya dalam memahami represi politik dalam karya sastra dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji hubungan antara karya sastra, politik, dan pembelajaran sastra.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian fokus penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bentuk-bentuk represi politik yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori.
- 2) Implikasi represi politik dalam novel *Laut Bercerita* terhadap pembelajaran sastra di sekolah.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan.

- 1) Menjelaskan bentuk-bentuk represi politik yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori;
- 2) Mendeskripsikan implikasi represi politik dalam novel *Laut Bercerita* terhadap pembelajaran sastra di sekolah;

1.4 Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori menggambarkan bentuk-bentuk represi politik yang terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia. Sebagai sebuah karya sastra, novel tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia diciptakan. Oleh karena itu, novel ini diasumsikan menggambarkan berbagai bentuk represi politik, seperti pengawasan, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang dialami oleh individu-individu yang dianggap "berbahaya" bagi rezim Orde Baru saat itu.

Kedua, pemahaman tentang sastra dapat memberikan implikasi positif dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran sastra yang responsif terhadap isu-isu sosial dan

politik, termasuk represi politik, diasumsikan dapat membantu siswa untuk menjadi warga negara yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Terakhir, analisis terhadap novel *Laut Bercerita* diasumsikan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian sastra Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara karya sastra, politik, dan pembelajaran sastra. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai represi politik dalam karya sastra dan implikasinya dalam pembelajaran sastra, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis.

1) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mendukung teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Alan Swingewood, khususnya tentang sastra sebagai dokumen sosial dan cerminan zaman. Melalui analisis novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori, penelitian ini menunjukkan bagaimana karya sastra dapat menjadi medium dokumentasi sejarah yang menggambarkan kondisi sosial politik pada masa tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Swingewood bahwa sastra merupakan refleksi langsung berbagai aspek struktur sosial, hubungan kekeluargaan, konflik kelas, dan trend-trend lain yang muncul dalam masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini memperkuat konsep Swingewood tentang sastra sebagai material dokumenter yang memberikan bukti tentang tatanan sosial pada zamannya. Analisis terhadap represi politik dalam novel *Laut Bercerita* membuktikan bagaimana sebuah karya sastra dapat merekam secara detail praktik-praktik kekuasaan, pola-pola kekerasan politik, dan dampak traumatis yang ditimbulkan pada masyarakat. Pendekatan ini menegaskan posisi sastra bukan sekadar sebagai karya imajinatif, tetapi juga sebagai dokumen sosiologis yang memiliki nilai historis.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru Bahasa Indonesia dalam merancang pembelajaran yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan politik. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk represi politik dan dampaknya yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita* dapat membantu guru untuk mengembangkan materi ajar dan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kepekaan dan pemahaman siswa terhadap isu-isu tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam tentang karya-karya sastra Indonesia yang mengangkat isu represi politik, baik dalam novel Laila S. Chudori yang lain maupun karya sastrawan Indonesia lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi model analisis dalam mengkaji hubungan antara karya sastra dan realitas sosial-politik, khususnya dalam konteks sejarah Indonesia.

Bagi komunitas sastra, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana sebuah karya sastra dapat menjadi medium untuk merekam dan menyuarakan peristiwa-peristiwa politik yang sensitif dalam sejarah bangsa, sekaligus menunjukkan peran penting sastra dalam mendokumentasikan memori kolektif masyarakat.

Bagi Dosen sastra Indonesia, penelitian ini dapat memperkaya materi dan metode pengajaran sastra di perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan mata kuliah yang berkaitan dengan kajian prosa fiksi, sosiologi sastra, dan kritik sastra. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pembelajaran sastra yang lebih kritis dan kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada aspek estetika tetapi juga pada dimensi sosial-politik karya sastra.

1.6 Penegasan Istilah

Guna memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut disampaikan penegasan istilah yang relevan.

1) Represi Politik

Represi politik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas untuk menekan, membatasi, atau menghancurkan perbedaan pendapat dan kebebasan individu.

2) Bentuk Represi Politik

Bentuk represi politik adalah segala tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk menekan, mengawasi, menghukum, atau menghilangkan individu atau kelompok yang dianggap "berbahaya" atau tidak sesuai dengan ideologi atau kepentingan politik rezim yang berkuasa. Bentuk represi politik meliputi: represi fisik (kekerasan, penyiksaan, pembunuhan), represi psikologis (intimidasi, pengucilan sosial, teror mental), represi institusional (kebijakan dan regulasi pembatas), represi kultural (pembatasan ekspresi budaya dan identitas), dan represi ekonomi (marginalisasi dan diskriminasi akses sumber daya ekonomi)

3) Novel *Laut Bercerita*

Novel *Laut Bercerita* adalah karya sastra berbentuk novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan pada tahun 2017 untuk cetakan ke-1 dan 2024 untuk cetakan ke-75 yang menceritakan tentang pengalaman tokoh-tokohnya yang hidup di tengah iklim politik yang tidak stabil dan penuh ketakutan di masa Orde Baru.

4) Implikasi dalam Pembelajaran Sastra

Implikasi dalam pembelajaran sastra dalam penelitian ini mengacu pada proses pengajaran dan pembelajaran karya sastra, khususnya pada kritik dan esai karya sastra.

5) Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra adalah pendekatan dalam mengkaji karya sastra dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi penciptaan karya tersebut.



BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang berjudul "Represi Politik dalam Novel *Laut Bercerita* Karya Laila S.Chudori Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Sastra". Pemaparan ini berisi tentang: 1) bentuk-bentuk represi politik dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S.Chudori, 2) implikasi represi politik dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S.Chudori terhadap pembelajaran sastra di sekolah.

5.1 Bentuk-bentuk Represi Politik dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori

Represi politik merupakan bentuk penindasan atau pembatasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap kebebasan individu atau kelompok masyarakat. Dalam konteks karya sastra Indonesia, khususnya novel, tema represi politik telah menjadi narasi yang signifikan dalam menggambarkan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Secara teoretis, pembahasan tentang represi memiliki beberapa ragam, di antaranya represi fisik, psikologis, institusional, kultural, dan ekonomi. Penelitian ini berfokus pada represi politik secara fisik, yang sebagian besar pembahasannya berkaitan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang untuk menekan kebebasan individu. Pada novel *Laut Bercerita*, represi politik dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparaturnya terhadap tokoh-tokoh yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan. Pada sub bab ini dipaparkan tentang bentuk-bentuk represi politik dalam novel *Laut Bercerita* karya Laila S.Chudori.

5.1.1 Praktik Penangkapan Sewenang-Wenang terhadap Warga Sipil

Data PS-01 menggambarkan tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dialami oleh tokoh Sunu: "Mereka membawa naratama masuk, Sunu dikeluarkan, dibawa entah ke mana... Sunu sudah seperti keponakan Bapak. Untuk beberapa saat Alex tidak meneruskan ceritanya." Kutipan ini menunjukkan bagaimana aparatus kekuasaan melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas. Penghilangan Sunu yang digambarkan secara mendadak dan tanpa informasi mengenai keberadaannya mencerminkan praktik represi yang sistematis, di mana kekuasaan dijalankan melalui tindakan sewenang-wenang untuk menciptakan ketakutan dan ketidakpastian.

Penggambaran penangkapan sewenang-wenang dalam novel *Laut Bercerita* mencerminkan bentuk represi politik seperti yang diidentifikasi oleh Kebung (2018), di mana represi tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga melalui represi psikologis berupa intimidasi dan teror mental. Hal ini juga selaras dengan pandangan Ridwan et al. (2023) yang menekankan bahwa represi politik dalam novel tidak hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi juga menjadi fokus utama yang menggerakkan alur dan membentuk karakter tokoh-tokohnya. Dalam konteks ini, penangkapan Sunu menjadi titik balik yang mempengaruhi dinamika cerita dan perkembangan karakter tokoh lain.

Analisis terhadap penangkapan sewenang-wenang yang dialami Sunu dapat dipahami melalui perspektif teori Kekuasaan Michel Foucault, di mana represi politik tidak hanya dipahami sebagai bentuk dominasi langsung, tetapi juga sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui berbagai institusi dan praktik sosial (Barasa and Riyanto 2023). Lebih lanjut, Kebung (2018) menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran yang kemudian digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik represif. Dalam novel ini, penangkapan sewenang-wenang terhadap Sunu menunjukkan bagaimana kekuasaan berfungsi untuk mengontrol dan mendisiplinkan individu melalui berbagai mekanisme sosial yang tersembunyi, menciptakan atmosfer ketakutan yang mempengaruhi tidak hanya korban langsung tetapi juga lingkungan sosialnya.

Data PS-02 menampilkan praktik penyiksaan dalam proses interogasi melalui kutipan: "Setiap kali mereka merasa aku berbohong, meski aku menjawab dengan jujur, maka si petugas yang berbahagia itu akan menyetrunku dengan semangat... Aku tak bisa ingat apa-apa lagi ketika sayup-sayup aku mendengar suara adzan." Kutipan ini menggambarkan bagaimana apparatus kekuasaan menggunakan kekerasan fisik berupa penyetruman sebagai metode interogasi, bahkan ketika korban telah memberikan jawaban jujur. Penggunaan kata "berbahagia" dan "semangat" dalam konteks penyiksaan menunjukkan ironi yang mengerikan tentang bagaimana petugas menikmati tindakan represif yang mereka lakukan.

Penggambaran kekerasan dalam proses interogasi ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Nensilianti, et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan teknik narasi yang mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang tajam. Ridwan et al. (2023) juga menegaskan bahwa represi politik seperti ini tidak hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi menjadi fokus utama yang membentuk karakter dan menggerakkan alur cerita, sebagaimana terlihat dari dampak trauma yang dialami tokoh.

Analisis terhadap praktik interogasi dan penyiksaan ini dapat dipahami melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), di mana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Kebung (2018) memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa praktik-praktik represif seperti penyiksaan dalam interogasi merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial. Dalam konteks novel ini, penyetruman dan kekerasan fisik menjadi mekanisme untuk mengontrol dan mendisiplinkan individu, menciptakan ketakutan yang mendalam dan trauma berkelanjutan.

Data PS-03 menggambarkan proses penangkapan yang dilakukan dengan kekerasan melalui kutipan: "Kami dikepung oleh lima orang yang menodong kami dengan senjata. Tangan kami diikat ke belakang. Kami duduk di lantai mobil belakang." Penggambaran ini menunjukkan taktik intimidasi dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam proses penangkapan, di mana korban tidak hanya diancam dengan senjata tetapi juga diperlakukan secara tidak manusiawi dengan pengikatan dan penempatan yang merendahkan martabat. Metode penangkapan semacam ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dimanifestasikan melalui demonstrasi kekuatan fisik dan penciptaan teror.

Pola penangkapan yang digambarkan dalam data tersebut merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai bentuk represi yang mengkombinasikan kekerasan fisik dengan intimidasi psikologis. Penggunaan senjata dan pengikatan tangan merupakan bentuk represi fisik, sementara penciptaan situasi tak berdaya dengan menempatkan korban di lantai mobil mencerminkan represi psikologis. Ridwan et al. (2023) lebih lanjut menegaskan bahwa penggambaran detail proses penangkapan semacam ini dalam novel tidak sekadar menjadi elemen cerita, tetapi berfungsi untuk mengungkap mekanisme kekuasaan yang sistematis dan terorganisir dalam melakukan praktik-praktik represif

Mengacu pada teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), metode penangkapan yang digambarkan merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui aparatus keamanan negara. Penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam proses penangkapan tidak hanya bertujuan untuk menangkap target, tetapi juga untuk menciptakan efek demonstratif yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Kebung (2018) bahwa kekuasaan bersifat produktif dalam membentuk pengetahuan dan "kebenaran" melalui praktik-praktik represif, di mana penangkapan dengan kekerasan menjadi alat untuk menanamkan ketakutan dan ketundukan dalam masyarakat luas. Proses penangkapan yang

brutal ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang lebih besar, di mana kekerasan fisik dan psikologis digunakan secara sistematis untuk mempertahankan dominasi kekuasaan.

Data PS-04 memperlihatkan intensitas penyiksaan dalam proses interogasi melalui kutipan: "Mereka menyetrunku dengan semangat; dari menjerit histeris hingga akhirnya aku tak sadar. Aku sudah tak bisa ingat apa-apa lagi ketika sayup-sayup aku mendengar suara adzan." Penggambaran ini tidak hanya menunjukkan brutalitas penyiksaan fisik, tetapi juga mengungkapkan bagaimana penyiksaan dilakukan hingga korban kehilangan kesadaran. Penggunaan kata "semangat" dalam konteks penyiksaan mengindikasikan normalisasi kekerasan oleh aparat, sementara referensi "suara adzan" memberikan kontras ironis antara praktik kekerasan dengan momen spiritual, sekaligus menandai durasi panjang dari penyiksaan tersebut.

Brutalitas penyiksaan yang digambarkan dalam data ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik mengambil bentuk kekerasan fisik yang sistematis dan terorganisir. Nensilianti et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik seperti ini untuk menghadirkan kritik yang tajam terhadap praktik-praktik represif. Penggambaran penyiksaan yang detail ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen naratif, tetapi juga sebagai dokumentasi historis yang dikemas dalam bentuk fiksi, sesuai dengan pandangan Ridwan et al. (2023) tentang pentingnya memahami teks sastra dalam konteks sejarah dan politik.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penyiksaan sistematis yang digambarkan merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui tubuh korban. Praktik penyiksaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk mendemonstrasikan kekuasaan absolut atas tubuh dan jiwa individu. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) bahwa kekuasaan bersifat produktif dalam menciptakan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Penyiksaan hingga hilang kesadaran menjadi mekanisme untuk menghancurkan resistensi individu sekaligus menciptakan contoh bagi yang lain tentang konsekuensi dari penentangan terhadap kekuasaan, menunjukkan bagaimana kekerasan fisik digunakan sebagai alat kontrol sosial yang lebih luas.

Data PS-05 mengungkapkan ketakutan mendalam korban melalui kutipan: "Ketika saya diperiksa dokter, saya mengira akan dieksekusi karena saya membaca di beberapa negara ada tahanan yang dicek dulu kesehatannya sebelum dibunuh." Penggambaran ini menunjukkan dampak psikologis dari praktik represi, di mana bahkan tindakan pemeriksaan kesehatan yang seharusnya bersifat humanis ditafsirkan sebagai prelud menuju kematian. Interpretasi korban

terhadap pemeriksaan kesehatan ini mencerminkan bagaimana teror dan ketakutan telah tertanam begitu dalam, hingga setiap tindakan aparat diasosiasikan dengan potensi kekerasan atau kematian.

Ketakutan yang digambarkan dalam data ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik tidak hanya berwujud kekerasan fisik tetapi juga mencakup teror mental yang mendalam. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa gambaran ketakutan semacam ini dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana represi politik mempengaruhi psikologi korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Nensilanti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan pengalaman individual untuk menghadirkan kritik yang lebih luas terhadap sistem kekuasaan yang represif.

Analisis terhadap ketakutan korban ini dapat dipahami melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), di mana kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui kekerasan fisik tetapi juga melalui penciptaan atmosfer ketakutan yang mengontrol pikiran dan perilaku. Ketakutan terhadap kemungkinan eksekusi, meskipun hanya berdasarkan dugaan, menunjukkan bagaimana kekuasaan telah berhasil menciptakan mekanisme kontrol yang efektif melalui teror psikologis. Kebung (2018) memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat produktif dalam membentuk persepsi dan "kebenaran" yang diyakini oleh korban, hingga interpretasi paling buruk terhadap setiap tindakan aparat menjadi respons yang dinormalisasi.

Data PS-06 menggambarkan brutalitas penyiksaan fisik melalui kutipan: "Ditonjok, digebuk, dipukul dengan penggaris besi setiap kali jawaban saya tidak jujur, disetrum dari jam 10 malam hingga subuh." Kutipan ini mengungkapkan variasi metode penyiksaan yang digunakan secara sistematis, mulai dari pemukulan manual hingga penggunaan alat seperti penggaris besi dan setrum. Durasi penyiksaan yang berlangsung dari malam hingga subuh menunjukkan bagaimana kekerasan dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, dengan tujuan untuk memaksa pengakuan atau informasi dari korban. Penggunaan kata "setiap kali" mengindikasikan bahwa penyiksaan dilakukan secara berulang dan menjadi pola tetap dalam proses interogasi.

Pola penyiksaan yang digambarkan dalam data ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bentuk-bentuk represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan intimidasi sistematis. Hal ini juga sejalan dengan analisis Ridwan et al. (2023) yang menunjukkan kekerasan dalam novel tidak hanya berfungsi sebagai elemen cerita, tetapi juga sebagai dokumentasi praktik-praktik represif yang terjadi dalam konteks historis tertentu. Nensilanti

et al. (2024) lebih lanjut menegaskan bahwa penggambaran detail penyiksaan semacam ini merupakan strategi naratif untuk menghadirkan kritik yang tajam terhadap aparat kekuasaan yang menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penyiksaan sistematis yang digambarkan merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui kontrol atas tubuh korban. Penggunaan berbagai metode penyiksaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk mendemonstrasikan dominasi absolut kekuasaan atas individu. Kebung (2018) memperkuat analisis ini dengan menjelaskan bahwa praktik-praktik represif semacam ini merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang lebih luas untuk menciptakan ketundukan melalui rasa sakit dan ketakutan. Penyiksaan berkelanjutan menjadi alat untuk menghancurkan tidak hanya resistensi fisik tetapi juga kehendak dan identitas korban.

Data PS-07 menggambarkan situasi teror psikologis melalui kutipan: "Mereka membawa Sunu, Julius, dan Gusti untuk interogasi. Di ruangan sebelah, kami hanya bisa mendengar suara mereka tanpa tahu apa yang terjadi." Kutipan ini mengungkapkan bentuk penyiksaan psikologis yang dialami oleh tahanan yang mendengar proses interogasi rekan-rekan mereka. Ketidakmampuan untuk melihat apa yang terjadi namun dapat mendengar suara-suara dari ruang interogasi menciptakan teror mental yang intens. Penggunaan frasa "hanya bisa mendengar" menekankan ketidakberdayaan para tahanan yang dipaksa menjadi saksi tidak langsung dari penyiksaan rekan mereka.

Penggambaran teror psikologis ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik mengkombinasikan kekerasan fisik dengan teror mental untuk menciptakan efek yang lebih mendalam. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana novel menggunakan teknik narasi semacam ini untuk mengungkap lapisan-lapisan penderitaan yang dialami korban represi. Representasi ketidakberdayaan dan keterpisahan fisik antara tahanan, seperti yang dijelaskan Nensilanti et al. (2024), menjadi cara novel menghadirkan kritik terhadap sistem yang menggunakan isolasi dan ketidakpastian sebagai alat kontrol.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), penggunaan ruang interogasi yang terpisah namun dapat terdengar merupakan bentuk panoptikon yang dimodifikasi, di mana ketidakpastian dan ketakutan menjadi alat kontrol yang efektif. Kebung (2018) memperkuat analisis ini dengan menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui kekerasan langsung tetapi juga melalui penciptaan atmosfer teror yang mengontrol pikiran dan perilaku. Pemisahan fisik

antara tahanan sambil tetap memungkinkan mereka mendengar suara-suara interogasi merupakan strategi represif yang dirancang untuk menghancurkan solidaritas dan resistensi melalui penanaman rasa takut dan ketidakberdayaan yang mendalam.

Data PS-08 menggambarkan taktik intimidasi dalam penangkapan melalui kutipan: "Kami dikejutkan oleh suara keras dari pintu depan yang didobrak. Tiga pria berseragam masuk tanpa mengucapkan sepatah kata." Penggambaran ini menunjukkan penggunaan kekerasan dan teror sebagai taktik awal penangkapan, di mana pintu didobrak tanpa peringatan dan aparat masuk dalam keheningan yang mengintimidasi. Ketidadaan komunikasi verbal dari aparat dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam memasuki ruangan mencerminkan strategi untuk menciptakan ketakutan dan ketidakberdayaan sejak awal kontak dengan target penangkapan.

Metode penangkapan yang digambarkan ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi fisik dan psikologis digunakan secara simultan untuk memaksimalkan efek teror. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggambaran detail proses penangkapan semacam ini dalam novel berfungsi untuk mengekspos brutalitas aparatus negara dalam menjalankan represi. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan momen-momen traumatis seperti pendobrakan pintu dan keheningan yang mengancam untuk mengkritik praktik-praktik represif yang sistematis.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), taktik penangkapan yang menggunakan kekerasan dan keheningan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui demonstrasi kekuatan fisik sekaligus penciptaan teror psikologis. Ketidadaan komunikasi verbal dari aparat, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan disorientasi dan ketakutan pada target. Pendobrakan pintu dan keheningan yang mengintimidasi bukan sekadar tindakan fisik, tetapi merupakan bahasa kekuasaan yang dirancang untuk menunjukkan dominasi absolut dan menghancurkan resistensi sejak awal kontak.

Data PS-09 menggambarkan tindakan penahanan sewenang-wenang melalui kutipan: "Biru Laut diikat dan dilempar ke dalam truk tanpa diberi tahu alasannya." Penggambaran ini mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik (diikat dan dilempar) tetapi juga diabaikan hak dasarnya untuk mengetahui alasan penahanan. Penggunaan kata "dilempar" menunjukkan dehumanisasi

korban, memperlakukannya seperti benda dan bukan manusia, sementara frasa "tanpa diberi tahu alasannya" menekankan kesewenang-wenangan yang absolut dari aparat kekuasaan.

Penggambaran kesewenang-wenangan ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik mencakup kombinasi kekerasan fisik dan pengabaian hak-hak dasar manusia. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi penahanan sewenang-wenang dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi tanpa akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilianti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk menghadirkan kritik terhadap sistem yang otoriter.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), penahanan tanpa penjelasan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui penciptaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Keengganan untuk memberikan alasan penahanan, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk mempertahankan dominasi melalui kontrol informasi dan menciptakan atmosfer ketakutan. Perlakuan tidak manusiawi terhadap korban bukan hanya menunjukkan brutalitas fisik, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja untuk menghancurkan martabat dan identitas individu sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang lebih luas.

Data PS-10 mengungkapkan praktik penyitaan sewenang-wenang melalui kutipan: "Mereka membawa barang-barang kami, termasuk buku dan catatan penting, seolah-olah itu adalah bukti kriminal." Penggambaran ini menunjukkan bagaimana aparat kekuasaan mengkriminalisasi kepemilikan benda-benda intelektual seperti buku dan catatan. Penggunaan frasa "seolah-olah itu adalah bukti kriminal" mengindikasikan bagaimana kekuasaan menciptakan narasi kriminalisasi terhadap aktivitas intelektual dan dokumentasi pribadi. Penyitaan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hak milik, tetapi juga bentuk represi terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi.

Praktik penyitaan yang digambarkan ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik tidak hanya berwujud kekerasan fisik tetapi juga mencakup pembatasan terhadap aktivitas intelektual dan kultural. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggambaran penyitaan barang-barang pribadi dalam novel berfungsi untuk mengekspos bagaimana kekuasaan berupaya mengontrol tidak hanya tubuh tetapi juga pikiran dan ekspresi individu. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et

al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang penyitaan untuk mengkritik praktik-praktik pembungkaman intelektual.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penyitaan buku dan catatan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang berupaya mengontrol produksi dan sirkulasi pengetahuan. Kriminalisasi terhadap kepemilikan benda-benda intelektual, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk membentuk "kebenaran" yang diakui dan membungkam narasi-narasi alternatif. Penyitaan tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan bukti, tetapi juga untuk menciptakan ketakutan dan membatasi ruang gerak intelektual sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang lebih luas terhadap kesadaran dan pemikiran kritis masyarakat.

Data PS-11 menggambarkan penggunaan ancaman kekerasan melalui kutipan: "Semua orang diam, tidak ada yang berani menentang, karena senjata mereka mengancam kami." Penggambaran ini mengungkapkan bagaimana senjata digunakan sebagai alat intimidasi untuk menciptakan ketundukan paksa. Keheningan yang tercipta bukan merupakan kepatuhan sukarela, melainkan hasil dari ancaman kekerasan langsung. Frasa "tidak ada yang berani menentang" menunjukkan bagaimana ancaman fisik berhasil melumpuhkan potensi perlawanan dan menciptakan ketidakberdayaan kolektif.

Penggunaan ancaman senjata yang digambarkan ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan intimidasi psikologis untuk menciptakan ketundukan. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi ancaman kekerasan dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan mempertahankan dominasinya melalui penciptaan rasa takut. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilianti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan momen-momen intimidasi untuk mengkritik praktik-praktik koersif aparat negara.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), penggunaan senjata sebagai alat intimidasi merupakan manifestasi paling nyata dari kekuasaan yang beroperasi melalui ancaman kekerasan langsung. Keheningan yang dipaksakan melalui ancaman, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan ketundukan melalui rasa takut. Ancaman kekerasan berfungsi ganda: secara langsung melumpuhkan perlawanan fisik dan secara psikologis menanamkan ketakutan yang mendalam, menciptakan mekanisme kontrol yang efektif melalui kombinasi ancaman nyata dan teror mental.

Data PS-12 menggambarkan tindakan invasif dan sewenang-wenang melalui kutipan: "Mereka langsung menyerbu masuk ke rumah, tanpa izin, membawa semua barang kami tanpa penjelasan. Saya hanya bisa pasrah." Penggambaran ini mengungkapkan pelanggaran hak privasi dan hak milik yang sistematis, di mana aparat melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa prosedur hukum yang jelas. Penggunaan kata "menyerbu" menunjukkan tindakan agresif dan mengintimidasi, sementara frasa "tanpa izin" dan "tanpa penjelasan" menekankan kesewenang-wenangan absolut. Respon "hanya bisa pasrah" menggambarkan ketidakberdayaan korban menghadapi praktik represif ini.

Penggambaran penggeledahan paksa ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik melibatkan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar warga negara. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi invasif terhadap ruang privat dalam novel berfungsi untuk mengekspos bagaimana kekuasaan mengabaikan batas-batas hukum dan etika. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang pelanggaran privasi untuk mengkritik praktik-praktik abuse of power oleh aparat negara.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penggeledahan paksa tanpa prosedur hukum merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui penghancuran batas-batas privasi dan hak individu. Ketidakberdayaan korban yang hanya bisa pasrah, seperti yang dijelaskan (Kebung 2018), menunjukkan bagaimana kekuasaan berhasil menciptakan subjek yang tunduk melalui demonstrasi kekuatan yang sewenang-wenang. Invasi terhadap ruang privat tidak hanya bertujuan untuk mencari barang bukti, tetapi juga untuk mendemonstrasikan jangkauan kekuasaan yang dapat menembus hingga ke ruang paling pribadi dari kehidupan warga negara.

Data PS-13 menggambarkan tindakan penahanan sewenang-wenang melalui kutipan: "Laut ditarik keluar dari kerumunan, diborgol tanpa ada yang memberi tahu alasannya." Penggambaran ini mengungkapkan praktik penahanan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip due process of law. Penggunaan kata "ditarik" menunjukkan penggunaan kekerasan fisik, sementara pemborgolan "tanpa ada yang memberi tahu alasannya" mengindikasikan pelanggaran hak tahanan untuk mengetahui dasar penahanannya. Tindakan ini dilakukan di depan umum (dari kerumunan), menunjukkan bagaimana kekuasaan secara terbuka mendemonstrasikan dominasinya untuk menciptakan efek teror yang lebih luas.

Praktik penahanan sewenang-wenang yang digambarkan ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan pengabaian hak-hak prosedural untuk menciptakan ketakutan. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi penahanan sewenang-wenang dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi tanpa akuntabilitas hukum. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilianti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan momen-momen penahanan untuk mengkritik praktik-praktik ilegal yang dilakukan aparat negara.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), penahanan tanpa penjelasan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui demonstrasi kekuatan sekaligus penciptaan ketidakpastian hukum. Pemborgolan di depan umum, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan spektakel yang menunjukkan konsekuensi dari resistensi terhadap kekuasaan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menahan individu tertentu, tetapi juga untuk menanamkan ketakutan kolektif dan menciptakan subjek-subjek yang patuh melalui demonstrasi konsekuensi dari pembangkangan.

Data PS-14 menggambarkan taktik intimidasi dalam penangkapan melalui kutipan: "Mereka datang tengah malam, tanpa sepatah kata. Pintu didobrak, lampu dimatikan, kami dipaksa berlutut." Penggambaran ini mengungkapkan strategi teror yang terencana, di mana waktu penangkapan (tengah malam), keheningan aparat, kekerasan fisik (pendobrakan), manipulasi lingkungan (pemadaman lampu), dan pemaksaan posisi merendahkan (berlutut) digunakan secara simultan. Kombinasi elemen-elemen ini menciptakan disorientasi total dan ketidakberdayaan pada korban. Penggunaan kata "dipaksa berlutut" khususnya menunjukkan upaya sistematis untuk menghancurkan martabat korban melalui subordinasi fisik.

Taktik intimidasi yang digambarkan ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan psikologis untuk memaksimalkan efek teror. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggambaran detail proses penangkapan semacam ini dalam novel berfungsi untuk mengekspos metode-metode yang digunakan aparat negara dalam menciptakan ketakutan sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan momen-momen traumatis untuk mengkritik praktik-praktik dehumanisasi yang dilakukan oleh aparat kekuasaan.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penggunaan berbagai taktik intimidasi merupakan manifestasi dari kekuasaan

yang beroperasi melalui manipulasi sistematis terhadap ruang, waktu, dan tubuh korban. Pemilihan waktu tengah malam dan pemadaman lampu, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan disorientasi total yang memudahkan dominasi. Pemaksaan posisi berlutut tidak hanya merupakan kontrol fisik, tetapi juga simbolisasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana kekuasaan berupaya menciptakan ketundukan absolut melalui kombinasi teror fisik dan psikologis.

Data PS-15 menggambarkan metode penangkapan yang melanggar hak asasi manusia melalui kutipan: "Tangan kami diikat dengan kasar, mata ditutup kain hitam. Kami tidak tahu akan dibawa ke mana." Penggambaran ini mengungkapkan praktik penangkapan yang menggabungkan kekerasan fisik dengan upaya sistematis untuk menciptakan disorientasi pada korban. Penggunaan kata "kasar" menunjukkan tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit, sementara penutupan mata dan ketidakpastian tujuan menciptakan teror psikologis yang mendalam. Kombinasi pengikatan dan penutupan mata tidak hanya membatasi gerak fisik tetapi juga merampas kemampuan korban untuk memahami dan merespons situasi yang dihadapi.

Metode penangkapan yang digambarkan ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan psikologis untuk memaksimalkan efek teror dan ketidakberdayaan. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi detail proses penangkapan dalam novel berfungsi untuk mengungkap praktik-praktik sistematis yang dirancang untuk menghancurkan perlawanan melalui disorientasi total. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilanti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan penggambaran metode-metode dehumanisasi untuk mengkritik praktik-praktik pelanggaran HAM.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), pengikatan dan penutupan mata merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui kontrol total atas tubuh dan sensori korban. Penciptaan ketidakpastian melalui disorientasi, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk membangun dominasi absolut melalui penghancuran kemampuan korban untuk memahami dan merespons situasi. Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya pada level fisik tetapi juga pada level psikologis untuk menciptakan subjek yang sepenuhnya tunduk dan tidak berdaya.

Data PS-16 menggambarkan operasi penangkapan terselubung melalui kutipan: "Mobil tanpa plat nomor itu berhenti mendadak. Empat orang berpakaian preman langsung menarik

paksa aktivis yang sedang berjalan." Penggambaran ini mengungkapkan taktik penangkapan yang dilakukan secara rahasia dan ilegal. Penggunaan mobil tanpa plat nomor dan petugas berpakaian preman menunjukkan upaya untuk menghindari identifikasi dan akuntabilitas. Kata "menarik paksa" mengindikasikan penggunaan kekerasan, sementara penargetan "aktivis yang sedang berjalan" menunjukkan pengawasan dan pemilihan target yang sistematis. Metode ini mencerminkan bagaimana aparatus kekuasaan beroperasi di luar kerangka hukum resmi.

Operasi penangkapan terselubung yang digambarkan ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik sering dilakukan melalui mekanisme yang tidak transparan untuk menghindari pertanggungjawaban. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi penangkapan ilegal dalam novel berfungsi untuk mengekspos praktik-praktik di luar hukum yang dilakukan oleh aparatus negara. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang operasi terselubung untuk mengkritik praktik-praktik ilegal yang dilakukan atas nama negara.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penggunaan mobil tak beridentitas dan petugas berpakaian preman merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui mekanisme tersembunyi namun sistematis. Penangkapan yang dilakukan tanpa identitas resmi, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan teror melalui ketidakpastian dan ketidakmampuan korban untuk mengidentifikasi pelaku. Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat beroperasi di luar batas-batas hukum formal sambil tetap mempertahankan efektivitasnya dalam menciptakan ketakutan dan ketundukan.

Data PS-17 menggambarkan pelanggaran prosedur hukum dalam penangkapan melalui kutipan: "Tanpa surat perintah, tanpa penjelasan, mereka menyeret kami dari tempat pertemuan. Seolah kami adalah kriminal berbahaya." Penggambaran ini mengungkapkan praktik penangkapan yang melanggar hak-hak prosedural dasar. Penggunaan frasa "tanpa surat perintah, tanpa penjelasan" menekankan pelanggaran terhadap due process of law, sementara kata "menyeret" menunjukkan penggunaan kekerasan fisik. Perbandingan dengan "kriminal berbahaya" mengindikasikan bagaimana aparatus kekuasaan melakukan kriminalisasi terhadap aktivitas berkumpul dan berdiskusi, menciptakan stigmatisasi terhadap korban.

Penggambaran pelanggaran prosedur hukum ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik sering mengabaikan prinsip-prinsip hukum dasar untuk

memaksimalkan efek intimidasi. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi penangkapan ilegal dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi di luar batas-batas hukum yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilianti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang pelanggaran hukum untuk mengkritik praktik-praktik abuse of power.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), pengabaian prosedur hukum dalam penangkapan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui normalisasi praktik-praktik ilegal. Kriminalisasi aktivitas berkumpul, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk mendelegitimasi aktivitas-aktivitas yang dianggap mengancam dominasinya. Praktik penangkapan sewenang-wenang ini tidak hanya bertujuan untuk menahan individu tertentu, tetapi juga untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat luas, menunjukkan bagaimana kekuasaan menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan pelanggaran hukum untuk mempertahankan kontrolnya.

Data PS-18 menggambarkan penggunaan ancaman senjata dalam penangkapan melalui kutipan: "Satu per satu, kawan-kawan kami ditarik dari kerumunan. Tidak ada yang berani melawan saat senjata dikeluarkan." Penggambaran ini mengungkapkan taktik intimidasi sistematis melalui ancaman kekerasan bersenjata. Penggunaan kata "satu per satu" menunjukkan metode penangkapan yang terencana dan bertahap, sementara frasa "tidak ada yang berani melawan" mengindikasikan efektivitas ancaman senjata dalam melumpuhkan perlawanan. Proses penangkapan yang dilakukan di depan "kawan-kawan" menciptakan efek teror kolektif dan mendemonstrasikan konsekuensi dari pembangkangan.

Penggunaan ancaman senjata yang digambarkan ini memperkuat analisis Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan kombinasi kekerasan fisik dan teror psikologis untuk menciptakan ketundukan. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi ancaman kekerasan bersenjata dalam novel berfungsi untuk mengekspos metode-metode koersif yang digunakan aparatus negara. Hal ini sejalan dengan temuan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan momen-momen intimidasi untuk mengkritik praktik-praktik teror yang dilakukan atas nama keamanan.

Ditinjau melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dijelaskan oleh Barasa and Riyanto (2023), penggunaan ancaman senjata merupakan manifestasi paling nyata dari kekuasaan yang beroperasi melalui ancaman kekerasan langsung. Penangkapan secara

bertahap di depan umum, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan spektakel yang menunjukkan konsekuensi dari resistensi. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap target-target tertentu, tetapi juga untuk membangun mekanisme kontrol yang lebih luas melalui demonstrasi kekuatan dan penciptaan ketakutan kolektif.

Data PS-19 menggambarkan taktik pengepungan mendadak melalui kutipan: "Satu gerakan mendadak, dan ruangan penuh dengan sosok berbaju gelap yang membawa senjata. Kami terkepung tanpa ampun." Penggambaran ini mengungkapkan strategi intimidasi yang dirancang untuk menciptakan keterkejutan dan ketidakberdayaan total. Penggunaan frasa "sosok berbaju gelap" menunjukkan upaya untuk menciptakan anonimitas yang mengintimidasi, sementara kata "terkepung tanpa ampun" menekankan ketidakberdayaan korban yang komplet. Kombinasi antara kecepatan operasi ("satu gerakan mendadak") dan kehadiran massal aparat bersenjata menunjukkan penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk memaksimalkan efek teror.

Taktik pengepungan mendadak yang digambarkan ini memperkuat temuan Kebung (2018) tentang bagaimana represi politik menggunakan elemen kejutan dan demonstrasi kekuatan untuk memaksimalkan efek intimidasi. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa representasi pengepungan dalam novel berfungsi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan menggunakan taktik-taktik militeristik terhadap warga sipil. Hal ini sejalan dengan analisis Nensilianti et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan detail-detail spesifik tentang operasi pengepungan untuk mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparatus negara.

Menganalisis data ini melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), pengepungan mendadak merupakan manifestasi dari kekuasaan yang beroperasi melalui demonstrasi kekuatan yang mengejutkan dan melumpuhkan. Penggunaan personel berpakaian gelap dan bersenjata, seperti yang dijelaskan Kebung (2018), menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk menciptakan teror melalui anonimitas dan ancaman kekerasan. Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan menggunakan kombinasi elemen kejutan, kekuatan massal, dan ancaman kekerasan untuk menciptakan ketundukan absolut dan menghancurkan setiap potensi perlawanan.

Data PS-20 mengungkapkan esensi represi politik melalui kutipan: "Tidak ada penjelasan, tidak ada surat perintah. Hanya kekerasan dan ketakutan yang memenuhi ruangan." Kutipan ini mengekspresikan model represi yang menghilangkan setiap prosedur hukum, menggantikannya dengan kekerasan sistematis dan intimidasi psikologis. Frasa "tidak

ada penjelasan" dan "tidak ada surat perintah" secara eksplisit menunjukkan pelanggaran hak-hak dasar individu, di mana tindakan represif dilakukan tanpa landasan legal apapun. Kata "hanya kekerasan dan ketakutan" menegaskan bahwa instrumen utama kekuasaan dalam konteks ini adalah teror dan ancaman.

Analisis data ini sejalan dengan temuan Kebung (2018) tentang kompleksitas represi politik yang melampaui sekadar kekerasan fisik. Ridwan et al. (2023) dalam penelitiannya menekankan bagaimana representasi semacam ini dalam karya sastra mengungkap mekanisme kekuasaan yang tidak hanya menindas secara fisik tetapi juga membentuk rezim ketakutan. Nensilianti et al. (2024) mencatat bahwa narasi seperti ini menggunakan teknik dokumentasi faktual yang dikombinasikan dengan elemen naratif untuk menghadirkan kritik sosial-politik yang tajam namun subtil.

Melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang dibahas Barasa and Riyanto (2023), data PS-20 memperlihatkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui penghapusan batas-batas normatif dan hukum. Dalam konteks ini, kekerasan dan ketakutan menjadi mekanisme utama untuk menciptakan ketundukan. Selaras dengan konsep hegemoni Gramsci, praktik ini bukan sekadar dominasi fisik, melainkan upaya untuk membentuk konsensus melalui teror yang menghasilkan internalisasi ketakutan. Greenblatt dalam perspektif New Historicism akan melihat representasi ini sebagai refleksi dinamika kekuasaan yang melampaui sekadar peristiwa historis, tetapi sebagai struktur sistemik yang membentuk pengalaman sosial dan individual.

Data PS-21 menghadirkan metafora yang kuat tentang represi politik melalui kutipan: "Mereka menyergap kami seperti serigala, mencabut kami dari ruang aman kami dalam sekejap." Penggunaan metafora binatang "serigala" secara simbolis menggambarkan sifat predatoris dari tindakan represif. Frasa "menyergap" dan "mencabut dari ruang aman" mengekspresikan dimensi psikologis represi yang melampaui kekerasan fisik, yaitu penghancuran sense of security dan ruang personal individu. Analisis linguistik menunjukkan bahwa pemilihan diksi "dalam sekejap" menekankan mendadak dan totalnya tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh aparat.

Temuan ini sejalan dengan perspektif Greenblatt dalam New Historicism yang menekankan pentingnya memahami teks sastra dalam konteks historis dan politik (Ridwan et al. 2023). Nensilianti et al. (2024) mencatat bahwa novel-novel bertema represi politik cenderung menggunakan teknik naratif berlapis untuk menghadirkan kritik sosial, di mana metafora dan penggunaan bahasa simbolik menjadi instrumen utama. Kebung (2018) dalam penelitiannya tentang represi politik juga mengidentifikasi bahwa representasi kekerasan

tidak sekadar dokumentasi faktual, melainkan upaya dekonstruksi sistematis terhadap mekanisme kekuasaan.

Menggunakan kerangka teori Kekuasaan Michel Foucault yang dibahas Barasa and Riyanto (2023), kutipan ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme pengawasan dan penindasan yang menyeluruh. Metafora "serigala" tidak sekadar representasi kekerasan, tetapi menunjukkan relasi kuasa yang mendefinisikan subjek dalam posisi ketidakberdayaan absolut. Konsep hegemoni Gramsci terlihat dalam bagaimana tindakan represif tidak hanya menggunakan kekerasan fisik, melainkan membentuk rezim ketakutan yang menghasilkan ketundukan sukarela. Proses "mencabut dari ruang aman" dapat dibaca sebagai strategi dekonstruksi identitas dan ruang eksistensial individu, di mana kekuasaan tidak sekadar menindas, tetapi membentuk ulang subjektivitas melalui mekanisme teror sistematis.

Data PS-22 menghadirkan deskripsi operasi penangkapan yang terorganisir melalui kutipan: "Kendaraan tanpa identitas itu berhenti mendadak, empat orang berbadan kekar segera menarik paksa korban." Analisis mikro terhadap kutipan ini mengungkap strategi sistematis dalam praktik represi. Frasa "kendaraan tanpa identitas" menunjukkan upaya untuk menciptakan anonimitas institusional, yang secara strategis menghilangkan akuntabilitas dalam tindakan represif. Penggunaan deskriptor "empat orang berbadan kekar" menghadirkan imaji kekerasan fisik yang dilegitimasi melalui pembentukan citra ancaman yang mendominasi.

Temuan ini berkorespondensi dengan penelitian Ridwan et al. (2023) yang menekankan bagaimana representasi ruang dan tubuh dalam narasi sastra membongkar mekanisme kekuasaan. Nensilianti et al. (2024) mencatat bahwa novel-novel bertema represi politik menggunakan detail naratif untuk menghadirkan kritik sosial-politik yang mendalam. Kebung (2018) dalam kajiannya tentang represi politik mengidentifikasi bahwa praktik penangkapan tidak sekadar tindakan individual, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan yang lebih luas.

Melalui perspektif teori Kekuasaan Foucault yang diinterpretasikan oleh Barasa and Riyanto (2023), kutipan ini mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme yang tidak hanya represif tetapi juga produktif dalam membentuk rezim ketakutan. Konsep hegemoni Gramsci terlihat dalam strategi "menarik paksa" yang menunjukkan bagaimana kekuasaan menciptakan ketundukan melalui demonstrasi kekuatan fisik. Greenblatt dalam pendekatan New Historicism akan membaca kutipan ini sebagai teks

yang tidak sekadar merepresentasikan peristiwa historis, tetapi mengungkap kompleksitas relasi kuasa yang membentuk pengalaman sosial-politik.

Data PS-23 menghadirkan representasi kekerasan verbal dan fisik dalam proses penangkapan melalui kutipan: "Suara bentakan dan dorongan kasar, tangan kami diborgol di belakang punggung tanpa belas kasihan." Analisis linguistik menunjukkan penggunaan kombinasi elemen auditori ("suara bentakan") dan fisik ("dorongan kasar", "diborgol") yang menciptakan pengalaman represif multi-sensoris. Frasa "tanpa belas kasihan" secara eksplisit mengungkap dehumanisasi yang melekat dalam praktik penangkapan, di mana korban diperlakukan di luar batas kemanusiaan.

Temuan ini selaras dengan kajian Ridwan et al. (2023) yang menekankan bagaimana representasi ruang dan tubuh dalam narasi sastra membongkar mekanisme kekuasaan. Nensilianti et al. (2024) mencatat bahwa novel-novel bertema represi politik menggunakan detail naratif untuk menghadirkan kritik sosial-politik yang mendalam. Penelitian Kebung (2018) tentang represi politik mengidentifikasi bahwa praktik penangkapan merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan yang kompleks, yang melampaui sekadar tindakan fisik.

Melalui kerangka teori Kekuasaan Foucault yang diinterpretasikan Barasa and Riyanto (2023), kutipan ini mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme yang tidak hanya represif tetapi juga produktif dalam membentuk rezim ketakutan. Konsep hegemoni Gramsci terlihat dalam strategi pemborgolan yang menunjukkan bagaimana kekuasaan menciptakan ketundukan melalui dominasi fisik. Pembacaan New Historicism à la Greenblatt akan membaca teks ini sebagai ruang di mana relasi kuasa dikonstruksi dan direpresentasikan.

5.1.2 Praktik Kekerasan Fisik Sebagai Bentuk Kontrol Penguasa

Data KF-01 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang brutal melalui kutipan: "Ditonjok, digebuk, dipukul dengan penggaris besi setiap kali jawaban saya tidak jujur, disetrum dari jam 10 malam hingga subuh." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan sistematis yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, mulai dari pemukulan hingga penyetruman yang dilakukan dalam durasi waktu yang panjang. Penyiksaan ini dilakukan sebagai metode interogasi untuk memaksa korban memberikan informasi, menunjukkan bagaimana kekuasaan dimanifestasikan melalui kekerasan fisik yang terorganisir.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang

meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-01 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-02 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang ekstrem melalui kutipan: "Seember air es disiramkan ke sekujur tubuhku... tubuhku diinjak dan ditendang bertubi-tubi hinggaelingaku berdenging." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan kombinasi kekerasan fisik dengan metode pendinginan ekstrem, yang dirancang untuk menciptakan penderitaan maksimal. Penggunaan air es dan tindakan penginjakan serta penendangan menggambarkan intensitas kekerasan yang sistematis dan terukur.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-02 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui

praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-03 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang intens melalui kutipan: "Tiba-tiba saja sebuah tongkat yang mengeluarkan lecutan listrik menghajar kepalaku. Aku menjerit ke ujung langit." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan dengan menggunakan alat setrum yang diaplikasikan langsung ke kepala korban, menciptakan pengalaman kekerasan yang traumatis dan menyiksa. Penggunaan kata "menghajar" dan "menjerit ke ujung langit" menegaskan intensitas rasa sakit yang dialami.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-03 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-04 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang sistematis melalui kutipan: "Tangan kiriku diborgol ke sisi velbed, kakiku diikat kabel, lalu alat setrum menyengat paha dan dadaku." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan pengekangan fisik dan penyiksaan elektrik yang dilakukan secara terstruktur. Penggunaan metode pemborgolan dan penyetruman di berbagai bagian tubuh menggambarkan pendekatan interogasi yang kompleks dan brutal.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-

novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-04 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-05 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang psikologis melalui kutipan: "Si Mata Merah menyundutkan rokoknya ke lengan dan pipiku, sambil berkata akan melakukan hal yang lebih buruk." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan kekerasan fisik melalui sundutan rokok yang disertai ancaman psikologis. Tindakan menyundutkan rokok ke tubuh korban menciptakan dimensi kekerasan yang melampaui sekadar rasa sakit fisik, tetapi juga membangkitkan teror psikologis melalui ancaman lebih lanjut.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-05 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui

praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-06 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan eksposur dingin melalui kutipan: "Aku disuruh tiduran di atas balok es berjam-jam sambil diinterogasi." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang menggunakan metode pendinginan ekstrem sebagai teknik interogasi. Penempatan korban di atas balok es dalam waktu yang lama merupakan bentuk penyiksaan yang dirancang untuk menciptakan penderitaan fisik dan mental yang intens.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-06 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-07 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang intens melalui kutipan: "Kepalaku diinjak dengan sepatu bergerigi... tulang-tulangku terasa retak karena semalaman tubuhku digebuk, diinjak, dan ditonjok." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan kekerasan berkelanjutan, dengan penekanan pada penginjakan kepala menggunakan sepatu bergerigi dan pemukulan berulang yang mengakibatkan kerusakan fisik yang parah.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-

novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-07 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-08 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang sistematis melalui kutipan: "Kawat panjang dililitkan pada jariku, diikuti ancaman penyetruman jika aku berbohong." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan pemasangan kawat pada jari korban dan ancaman penyetruman, menciptakan mekanisme teror psikologis yang kompleks dan brutal.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-08 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-09 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang intens melalui kutipan: "Tubuhku dipukul berkali-kali dengan tongkat hingga aku tidak mampu berdiri." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan pemukulan berulang dengan tongkat, mengakibatkan kerusakan fisik yang parah hingga korban kehilangan kemampuan untuk berdiri.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-09 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-10 menggambarkan bentuk kekerasan fisik dengan dimensi psikologis melalui kutipan: "Air dingin disiramkan ke tubuhku, sementara mereka tertawa melihat tubuhku menggigil." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan penyiraman air dingin dengan tambahan unsur psikologis berupa tindakan menertawakan penderitaan korban, menciptakan pengalaman kekerasan yang melampaui sekadar rasa sakit fisik.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-10 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-11 menggambarkan bentuk kekerasan fisik melalui kutipan: "Kabel listrik ditempelkan di leherku, dan setiap jawaban yang salah diikuti dengan sengatan listrik." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan penggunaan alat listrik di area vital tubuh, dengan mekanisme penyiksaan yang terkait langsung dengan proses interogasi.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam (Barasa and Riyanto 2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-11 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-12 menggambarkan bentuk kekerasan fisik melalui kutipan: "Aku disuruh jongkok selama berjam-jam, sementara kaki dan punggungku diinjak." Kutipan ini menunjukkan praktik penyiksaan yang melibatkan posisi tubuh yang menyiksa dan penginjakan berkelanjutan, menciptakan penderitaan fisik yang intens.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-12 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-13 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang ekstrem melalui kutipan: "Aku ditelentangkan di lantai dingin, dan sepatu berat menghantam tulang rusukku berulang kali hingga aku hampir tak bisa bernapas." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang sistematis dengan fokus pada pemukulan berulang pada area vital tubuh. Frasa "lantai dingin" menciptakan konteks kerentanan fisik korban, sementara "sepatu berat menghantam tulang rusukku" menggambarkan intensitas kekerasan yang direncanakan untuk mencederai secara maksimal. Penggunaan kata "berulang kali" mengindikasikan sifat metodis dari penyiksaan, yang bukan sekadar kekerasan spontan melainkan tindakan terstruktur yang dirancang untuk menghancurkan ketahanan fisik dan mental korban. Kondisi "hampir tak bisa bernapas" bukan sekadar metafora kesakitan, tetapi literalisasi dari upaya sistematis untuk melumpuhkan kemampuan bertahan hidup individu.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-13 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-14 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang sistematis melalui kutipan: "Tangan kananku diikat ke kursi, sedangkan kabel listrik menempel di leherku, siap menyetrum kapan saja." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang melibatkan pengekangan fisik dan ancaman elektrik yang konstan. Metode pemborgolan tangan dan penempatan kabel listrik di leher menciptakan ruang teror psikologis yang intens, di mana korban tidak hanya mengalami ketidakberdayaan fisik tetapi juga ketidakpastian akan penyiksaan yang akan datang.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-14 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-15 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang kompleks melalui kutipan: "Air garam disuntikkan ke dalam tubuhku, membakar setiap urat saraf dengan rasa sakit yang

tak tertahankan." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang melibatkan penggunaan zat kimia untuk menciptakan penderitaan fisik ekstrem. Penggunaan air garam sebagai instrumen penyiksaan menunjukkan tingkat kecanggihan metode yang dirancang untuk menghasilkan rasa sakit maksimal. Frasa "membakar setiap urat saraf" bukan sekadar metafora, melainkan deskripsi literal dari proses fisiologis yang disengaja untuk menghancurkan ketahanan tubuh. Pilihan kata "tak tertahankan" mengindikasikan intensitas penderitaan yang melampaui batas toleransi manusia, menciptakan ruang di mana tubuh tidak lagi menjadi milik individu, tetapi instrumen untuk menghasilkan kepatuhan melalui rasa sakit yang total.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-15 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-16 menggambarkan bentuk kekerasan fisik melalui kutipan: "Mereka memasang alat pengeang di kedua pergelangan tanganku, menekan hingga meninggalkan bekas merah yang menyakitkan." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang melibatkan pengeangan fisik dengan intensitas yang melampaui sekadar pembatasan gerak. Penggunaan alat pengeang yang diaplikasikan dengan tekanan berlebihan menciptakan luka fisik yang bersifat simbolis, di mana setiap bekas merah menjadi tanda dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Frasa "menekan hingga meninggalkan bekas merah" menunjukkan bahwa penderitaan tidak hanya bersifat sementara, tetapi meninggalkan jejak permanen baik secara fisik maupun psikologis.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-16 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-17 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang traumatis melalui kutipan: "Cambuk listrik itu menyentuh punggungku, menimbulkan bunyi decitan yang memekakkan telinga sebelum rasa sakit meledak." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang melibatkan teknologi elektrik dengan dimensi multisensorial yang kompleks. Deskripsi "bunyi decitan yang memekakkan telinga" menciptakan pengalaman kekerasan yang melampaui sekadar rasa sakit fisik, melibatkan aspek auditori yang menambah intensitas trauma. Frasa "rasa sakit meledak" menggambarkan karakteristik penderitaan yang tiba-tiba dan menghancurkan, di mana tubuh menjadi medan pertempuran di mana kekuasaan mengekspresikan kedaulatannya melalui infliks kesakitan.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-17 merupakan manifestasi

dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-18 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan eksposur dingin melalui kutipan: "Dipaksa berdiri di atas balok es selama berjam-jam, tubuhku gemetar dan kehilangan sensasi." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang memanfaatkan kondisi lingkungan ekstrem untuk menciptakan penderitaan fisik yang sistematis. Frasa "dipaksa berdiri di atas balok es" menunjukkan penggunaan posisi tubuh yang tidak alamiah dikombinasikan dengan kondisi suhu yang ekstrem, dirancang untuk melemahkan ketahanan fisik dan mental. Deskripsi "gemetar dan kehilangan sensasi" mengindikasikan proses dehumanisasi di mana tubuh korban secara bertahap dirampas kemampuannya untuk merespons rangsangan, menciptakan kondisi ketidakberdayaan total.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-18 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-19 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan intervensi kimiawi melalui kutipan: "Cairan dingin disuntikkan ke pembuluh darahku, membuat seluruh

tubuhku kejang dan tak berdaya." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang memanfaatkan manipulasi fisiologis untuk menciptakan penderitaan total. Frasa "cairan dingin disuntikkan ke pembuluh darahku" menunjukkan penggunaan metode medis yang disalahgunakan, di mana teknologi kesehatan diubah menjadi instrumen represi. Deskripsi "kejang dan tak berdaya" mengindikasikan proses dehumanisasi di mana tubuh korban dirampas kemampuan kontrolnya, menciptakan kondisi ketidakberdayaan mutlak yang melampaui sekadar rasa sakit fisik.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-19 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-20 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang mendalam melalui kutipan: "Aliran listrik membakar setiap urat sarafku, menjebol pertahanan terakhir kesadaranku." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang memanfaatkan teknologi elektrik untuk menciptakan rasa sakit yang melampaui batas ketahanan manusia. Frasa "membakar setiap urat sarafku" menunjukkan intensitas penderitaan yang total, di mana sensasi fisik menjadi begitu mendominasi sehingga mengancam struktur kesadaran individu. Deskripsi "menjebol pertahanan terakhir kesadaranku" mengindikasikan proses dehumanisasi di mana kekuasaan tidak sekadar menindas tubuh, tetapi berupaya menghancurkan integritas psikologis korban.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh (Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan

eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-20 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-21 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan eksposur suhu ekstrem melalui kutipan: "Mereka menuangkan air es ke tubuhku, membuat setiap sel terasa membeku dan hancur berkeping-keping." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang memanfaatkan kondisi lingkungan untuk menciptakan penderitaan fisiologis yang intens. Frasa "menuangkan air es" menunjukkan penggunaan metode pendinginan yang disengaja, sementara deskripsi "setiap sel terasa membeku dan hancur berkeping-keping" mengindikasikan tingkat kerusakan yang melampaui sekadar rasa sakit fisik, menciptakan pengalaman di mana tubuh diperlakukan sebagai objek yang dapat dihancurkan secara sistematis.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-21 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis.

Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini

diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-22 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang brutal melalui kutipan: "Pukulan demi pukulan mendarat, seperti hujan batu yang tak kenal ampun, menghancurkan setiap pertahananku." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang melibatkan kekerasan fisik berkelanjutan dengan intensitas yang tak terkendali. Metafora "seperti hujan batu" menggambarkan sifat membabi buta dan tanpa belas kasihan dari kekerasan yang dialami, di mana setiap pukulan dirancang untuk melemahkan ketahanan fisik dan mental korban. Frasa "menghancurkan setiap pertahananku" mengindikasikan proses dehumanisasi total, di mana individu diperlakukan sebagai objek yang dapat dihancurkan secara sistematis.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-22 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-23 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan penyalahgunaan instrumen medis melalui kutipan: "Tusukan jarum yang dingin menembus kulit, membawa cairan yang membuatku gemetar dan tak berdaya." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang memanfaatkan peralatan medis untuk menciptakan penderitaan yang sistematis. Frasa "tusukan jarum yang dingin" menunjukkan penggunaan metode invasif yang dirancang untuk menciptakan ketakutan dan rasa sakit, sementara deskripsi "membawa cairan

yang membuatku gemetar dan tak berdaya" mengindikasikan dimensi kimiawi dari penyiksaan yang merampas kontrol individu atas tubuhnya sendiri.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-23 merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

Data KF-24 menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang brutal melalui kutipan: "Sepatu tebal menghantam tulang rusukku berulang kali, menciptakan dentuman sakit yang memekakkan." Kutipan ini menghadirkan praktik penyiksaan yang menargetkan area vital tubuh dengan kekerasan sistematis. Frasa "sepatu tebal menghantam tulang rusukku" menunjukkan intensionalitas dalam merusak struktur fisik, sementara deskripsi "dentuman sakit yang memekakkan" mengindikasikan pengalaman penderitaan yang melampaui sekadar rasa sakit fisik, menciptakan dimensi auditori dari kekerasan yang dialami.

Penggambaran kekerasan fisik dalam novel ini merefleksikan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai salah satu bentuk utama represi politik, yaitu represi fisik yang meliputi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Representasi kekerasan yang detail dan eksplisit ini sejalan dengan pandangan Nensilianti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis, mengkombinasikan fakta historis dengan elemen fiksi untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam terhadap praktik-praktik represif yang terjadi.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault seperti yang dikutip dalam Barasa and Riyanto (2023), kekerasan fisik yang digambarkan dalam data KF-24 merupakan manifestasi

dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial yang sistematis. Penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan "kebenaran" melalui pengakuan yang dipaksa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran melalui praktik-praktik represif. Dalam konteks novel ini, penyiksaan fisik menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui rasa sakit dan ketakutan.

5.1.3 Praktik *Enforced Disappearance*: Penghilangan Eksistensi

Data HP-01 menggambarkan kasus penghilangan paksa melalui kutipan: "Mas Laut, Alex, dan Daniel diduga telah diambil secara paksa, seperti juga yang terjadi pada Mas Sunu, Narendra, Dana, Julius, dan Mas Gala." Kutipan ini mengungkapkan praktik penghilangan paksa yang sistematis terhadap sejumlah individu. Penggunaan kata "diduga" dan penyebutan beberapa nama menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan secara terorganisir dan menjadi pola yang berulang, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan dalam masyarakat mengenai nasib orang-orang yang dihilangkan.

Penghilangan paksa dalam novel ini sejalan dengan apa yang dibahas oleh Ridwan et al. (2023) tentang bagaimana represi politik tidak hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi menjadi fokus utama yang menggerakkan alur dan membentuk karakter tokoh-tokohnya. Penghilangan paksa yang digambarkan juga mencerminkan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai kombinasi dari represi fisik dan psikologis, di mana tindakan penghilangan orang tidak hanya berdampak pada korban langsung tetapi juga menciptakan teror mental dan pengucilan sosial bagi keluarga dan lingkungan korban.

Dalam perspektif teori Kekuasaan Michel Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), praktik penghilangan paksa merupakan manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial. Penghilangan paksa menjadi alat kontrol yang efektif karena menciptakan ketakutan kolektif dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk "kebenaran" yang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik represif. Dalam konteks pasca-reformasi, seperti yang dijelaskan dalam kajian teori, bentuk-bentuk represi semacam ini terus bertransformasi menjadi lebih halus dan sistemik, namun dampak traumatisnya tetap membekas dalam ingatan kolektif masyarakat.

Data HP-02 menggambarkan dampak psikologis penghilangan paksa melalui kutipan: "Pada tahun kedua hilangnya Mas Laut dan kawan-kawannya, tingkat pemahaman para orangtua dari bulan ke bulan semakin beragam. Ada orangtua yang yakin anak-anaknya masih hidup dan sekadar bersembunyi." Kutipan ini mengungkapkan proses psikologis kompleks yang dialami keluarga korban, di mana ketidakpastian menciptakan spektrum respon emosional yang berbeda-beda. Frasa "tingkat pemahaman para orangtua dari bulan ke bulan semakin beragam" menunjukkan bagaimana waktu tidak meredakan ketidakpastian, melainkan justru mempersulit proses pengolahan trauma. Keyakinan beberapa orangtua bahwa anak-anak mereka "masih hidup dan sekadar bersembunyi" mengindikasikan mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan untuk mengatasi rasa kehilangan dan ketidakpastian yang mendalam. Hal ini mencerminkan kompleksitas respon manusia terhadap kehilangan yang tidak terduga, di mana harapan menjadi strategi bertahan dalam menghadapi ketidakpastian yang traumatis.

Penghilangan paksa dalam novel ini sejalan dengan apa yang dibahas oleh Ridwan et al. (2023) tentang bagaimana represi politik tidak hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi menjadi fokus utama yang menggerakkan alur dan membentuk karakter tokoh-tokohnya. Penghilangan paksa yang digambarkan juga mencerminkan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai kombinasi dari represi fisik dan psikologis, di mana tindakan penghilangan orang tidak hanya berdampak pada korban langsung tetapi juga menciptakan teror mental dan pengucilan sosial bagi keluarga dan lingkungan korban.

Dalam perspektif teori Kekuasaan Michel Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), praktik penghilangan paksa merupakan manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial. Penghilangan paksa menjadi alat kontrol yang efektif karena menciptakan ketakutan kolektif dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk "kebenaran" yang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik represif. Dalam konteks pasca-reformasi, seperti yang dijelaskan dalam kajian teori, bentuk-bentuk represi semacam ini terus bertransformasi menjadi lebih halus dan sistemik, namun dampak traumatisnya tetap membekas dalam ingatan kolektif masyarakat.

Data HP-03 menggambarkan perluasan praktik penghilangan paksa melalui kutipan: "Sunu, Narendra, dan Mas Gala dinyatakan hilang secara paksa." Kutipan ini mengungkapkan praktik penghilangan paksa yang semakin meluas, menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekadar kasus individual, melainkan pola sistematis yang mencakup

sejumlah individu. Frasa "dinyatakan hilang secara paksa" menegaskan status resmi dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia, mengindikasikan bahwa penghilangan paksa telah menjadi praktik terstruktur yang diakui secara kelembagaan.

Representasi penghilangan paksa dalam novel ini sejalan dengan apa yang dibahas oleh Ridwan et al. (2023) tentang bagaimana represi politik tidak hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi menjadi fokus utama yang menggerakkan alur dan membentuk karakter tokoh-tokohnya. Penghilangan paksa yang digambarkan juga mencerminkan apa yang diidentifikasi oleh Kebung (2018) sebagai kombinasi dari represi fisik dan psikologis, di mana tindakan penghilangan orang tidak hanya berdampak pada korban langsung tetapi juga menciptakan teror mental dan pengucilan sosial bagi keluarga dan lingkungan korban.

Dalam perspektif teori Kekuasaan Michel Foucault yang dibahas oleh Barasa and Riyanto (2023), praktik penghilangan paksa merupakan manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi dan praktik sosial. Penghilangan paksa menjadi alat kontrol yang efektif karena menciptakan ketakutan kolektif dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kebung (2018) tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk "kebenaran" yang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik represif. Dalam konteks pasca-reformasi, seperti yang dijelaskan dalam kajian teori, bentuk-bentuk represi semacam ini terus bertransformasi menjadi lebih halus dan sistemik, namun dampak traumatisnya tetap membekas dalam ingatan kolektif masyarakat.

Data HP-04 mengeksplorasi upaya advokasi dan solidaritas dalam menghadapi penghilangan paksa melalui kutipan: "Hingga bulan September setelah Komisi Orang Hilang menyelenggarakan Tenda Keprihatinan... akhirnya aswin dan kawan-kawan dari LSM lain memutuskan untuk mengukuhkan seluruh keluarga menjadi bagian dari organisasi Komisi Orang Hilang." Kutipan ini mengungkapkan strategi mobilisasi sosial dan pembentukan solidaritas kolektif sebagai respons terhadap praktik sistematis penghilangan paksa. Inisiasi "Tenda Keprihatinan" menjadi ruang simbolik yang mentransformasi pengalaman individual menjadi gerakan kolektif, di mana keluarga korban tidak sekadar objek penderitaan, tetapi agen aktif dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Narasi penghilangan paksa dalam karya sastra ini menampilkan dimensi kompleks represi politik, sebagaimana dianalisis (Ridwan et al. 2023), yang menempatkan pengalaman korban sebagai episentrum kritik sosial. Representasi ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme resistensi terbentuk melalui solidaritas yang dibangun di atas fragmen-fragmen penderitaan kolektif. Konstruksi naratif semacam ini sejalan dengan pandangan Kebung

(2018) tentang represi yang melampaui sekadar tindakan represif, tetapi juga membuka ruang untuk pembangunan dan rekonstruksi identitas.

Dalam bingkai teoritis Michel Foucault yang diinterpretasi Barasa and Riyanto (2023), pembentukan Komisi Orang Hilang dapat dibaca sebagai counter-discourse terhadap rezim kekuasaan yang melanggengkan praktik penghilangan paksa. Gerakan ini tidak sekadar mendokumentasikan pelanggaran, melainkan menciptakan ruang alternatif di mana kebenaran yang disembunyikan dapat disuarakan. Proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak bersifat monolitik, tetapi selalu berpotensi untuk didekonstruksi melalui praktik-praktik pengetahuan dan solidaritas yang dibangun dari bawah.

Data HP-05 mengungkap dimensi harapan dan perlawanan simbolis melalui kutipan: "13 kawan yang belum kembali pasti akan muncul satu per satu pada saat yang tepat." Kutipan ini menghadirkan narasi optimisme yang bertahan di tengah ketidakpastian sistematis, di mana keyakinan menjadi mekanisme psikologis untuk melawan praktik penghilangan paksa. Frasa "pasti akan muncul" menunjukkan resistensi melalui konstruksi harapan, mengubah ketidakberdayaan menjadi semangat kolektif yang menolak narasi kekuasaan yang berupaya menghapus eksistensi individu.

Representasi penghilangan paksa dalam konteks ini memperlihatkan kompleksitas represi politik yang dianalisis Ridwan et al. (2023), di mana pengalaman korban tidak sekadar didefinisikan oleh tindakan penindasan, tetapi juga oleh kapasitas mereka untuk mempertahankan narasi alternatif. Konstruksi harapan ini mencerminkan apa yang diidentifikasi Kebung (2018) sebagai praktik resistensi dalam ruang-ruang yang tampaknya tidak memungkinkan perlawanan.

Melalui perspektif teori Kekuasaan Michel Foucault yang diinterpretasikan Barasa and Riyanto (2023), keyakinan akan kembalinya para korban dapat dibaca sebagai praktik pembentukan pengetahuan tandingan. Harapan menjadi instrumen subversif yang melampaui sekadar mekanisme pertahanan psikologis, tetapi juga strategi untuk mempertahankan ingatan kolektif dan menolak upaya penghapusan jejak yang dilakukan oleh rezim represif.

Data HP-06 mengeksplorasi konsep global penghilangan paksa melalui kutipan: "Desaparados: Penghilangan orang secara paksa... Jangan sampai ini terjadi terus-menerus." Kutipan ini membawa diskursus penghilangan paksa ke dalam konteks transnasional, menggunakan istilah "Desaparados" yang merujuk pada praktik sistematis penghilangan orang di Amerika Latin. Penggunaan terminologi internasional ini tidak sekadar memberikan label teknis, melainkan mengintegrasikan pengalaman lokal ke dalam narasi global tentang pelanggaran hak asasi manusia. Frasa "jangan sampai ini terjadi terus-menerus"

mengindikasikan kesadaran akan sifat berkelanjutan represi, sekaligus menyerukan urgensi intervensi dan transformasi struktur kekuasaan yang melanggengkan praktik tersebut.

Dalam kerangka analisis sastra post-kolonial, representasi ini menunjukkan kompleksitas bagaimana pengalaman represi Politik di Indonesia tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan genealogi global praktik kekerasan negara. Ridwan et al. (2023) menekankan bahwa novel-novel bertema represi tidak sekadar mendokumentasikan peristiwa lokal, tetapi membuka ruang dialog transnasional tentang mekanisme kekuasaan, kekerasan, dan resistensi. Narasi yang dibangun melampaui batas-batas geografis, menghadirkan solidaritas lintas konteks dan mendekonstruksi paradigma state-centric dalam memahami pelanggaran hak asasi manusia. Kebung (2018) dalam kajiannya tentang represi politik menegaskan bahwa praktik penghilangan paksa adalah ekspresi dari relasi kuasa yang kompleks, yang beroperasi tidak hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui produksi diskursus yang menormalisasi tindakan pelanggaran.

Dari perspektif teori Michel Foucault yang diinterpretasikan Barasa and Riyanto (2023), penggunaan istilah "Desaparasidos" membuka ruang untuk memahami kekuasaan sebagai rezim pengetahuan yang tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Istilah ini menjadi alat untuk mengartikulasikan pengalaman korban, sekaligus strategi untuk membongkar mekanisme kekerasan negara yang tersembunyi di balik narasi resmi. Proses penandaan dan pemberian nama pada praktik penghilangan paksa adalah praktik pembentukan pengetahuan yang memiliki potensi transformatif. Hal ini tidak sekadar upaya dokumentasi, melainkan strategi untuk membangkitkan kesadaran kritis, menghadirkan suara-suara yang telah dicoba untuk dihalangi, dan membangun memori kolektif yang menolak proses penghapusan jejak yang dilakukan oleh rezim represif.

Data HP-07 mengungkap dimensi traumatis hilangnya individu melalui kutipan: "Setelah malam itu, Mas Sunu tidak pernah lagi terlihat, dan tidak ada yang tahu di mana dia." Kutipan ini menghadirkan pengalaman penghilangan paksa yang melampaui sekadar kehilangan fisik, tetapi menyentuh wilayah eksistensial yang paling intim. Frasa "setelah malam itu" menciptakan momen naratif yang menandai titik diskontinuitas dalam kehidupan individu dan kolektif, di mana waktu seakan terbelah menjadi sebelum dan sesudah peristiwa traumatis. Penghilangan Mas Sunu tidak sekadar menghilangkan individu secara fisik, melainkan juga menciptakan lubang hitam dalam memori sosial, di mana ketidakpastian menjadi satu-satunya narasi yang tersisa.

Dalam perspektif analisis sastra kontemporer, representasi ini menunjukkan bagaimana novel menggunakan naratif mikrohistoris untuk membongkar mekanisme represi yang lebih

luas. Ridwan et al. (2023) menekankan bahwa pengalaman individual dalam konteks represi Politik tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang lebih sistemik. Narasi tentang Mas Sunu menjadi metafora yang mengeksplorasi bagaimana kekuasaan beroperasi melalui praktik penghapusan, di mana individu tidak sekadar hilang secara fisik, tetapi juga dihapus dari ruang sosial dan memori kolektif. Kebung (2018) dalam kajiannya tentang represi Politik mencatat bahwa penghilangan paksa adalah praktik yang melampaui tindakan kekerasan langsung, tetapi menciptakan rezim ketidakpastian yang berkelanjutan.

Membaca kutipan ini melalui kerangka teori Michel Foucault yang diinterpretasikan Barasa and Riyanto (2023), penghilangan Mas Sunu dapat dipahami sebagai manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang berupaya mengendalikan dan mendisiplinkan tubuh-tubuh yang dianggap berpotensi mengganggu tatanan. Peristiwa "tidak pernah lagi terlihat" bukan sekadar kehilangan individual, melainkan strategi sistematis untuk menciptakan rezim teror yang beroperasi melalui ketidakpastian. Proses penghilangan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menciptakan ruang psikologis di mana ketakutan dan ketidakberdayaan menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Dalam konteks ini, hilangnya Mas Sunu menjadi simbol dari bagaimana kekuasaan berupaya menghapus jejak-jejak perlawanan dan membungkam narasi alternatif.

Kutipan HP-08 menggambarkan praktik penghilangan paksa yang menciptakan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban. Penggunaan frasa "mencari di semua tempat" dan "tidak ada satu pun yang bisa memberi tahu" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa dirancang untuk menghapus jejak keberadaan korban secara total. Ketidakmampuan mendapatkan informasi tentang keberadaan orang yang hilang menunjukkan adanya sistem yang terorganisir dalam upaya menghilangkan akses informasi dan menciptakan kebungkaman institusional, yang mencerminkan apa yang disebut Foucault sebagai mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui praktik-praktik sosial yang tersembunyi (Kebung, 2018).

Fenomena penghilangan paksa yang digambarkan dalam data HP-08 ini sejalan dengan analisis Nensilanti, et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel yang mengangkat tema represi politik cenderung menggunakan teknik narasi berlapis untuk menghadirkan kritik yang lebih subtil namun tajam. Ketiadaan informasi dan kebungkaman institusional yang digambarkan dalam kutipan tersebut merupakan bentuk represi yang sistematis, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Barasa dan Riyanto (2023) tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui manipulasi informasi dan eksklusi sosial. Hal ini juga diperkuat oleh

penelitian Kebung (2018) yang menjelaskan bagaimana praktik-praktik represif terus bertransformasi seiring dengan perubahan sistem politik.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penghilangan paksa merupakan bentuk represi yang beroperasi melalui pengawasan dan normalisasi (Barasa and Riyanto, 2023). Ketidakmampuan mendapatkan informasi tentang keberadaan korban mencerminkan apa yang dijelaskan dalam teori Hegemoni Gramsci, di mana represi tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga melalui kepemimpinan moral dan intelektual untuk menciptakan konsensus (Kebung, 2018). Hal ini juga sejalan dengan perspektif teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami teks sastra dalam hubungannya dengan konteks sejarah dan politik pada masa teks tersebut diproduksi, di mana penghilangan paksa menjadi bagian dari strategi sistematis untuk menciptakan ketakutan dan ketundukan dalam masyarakat (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-09 menggambarkan dampak sosial dan psikologis dari praktik penghilangan paksa yang tidak hanya menghilangkan keberadaan fisik korban tetapi juga eksistensi sosial mereka. Penggunaan metafora "bayangan dalam ingatan" dan frasa "seolah mereka tidak pernah ada" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa berhasil menciptakan proses pelenyapan sistematis terhadap identitas dan jejak kehidupan korban dalam memori kolektif masyarakat. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Foucault sebagai praktik kekuasaan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran yang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik represif (Barasa and Riyanto 2023).

Proses penghapusan eksistensi sosial yang digambarkan dalam data HP-09 ini berkorelasi dengan penelitian Kebung (2018) yang menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi melalui berbagai mekanisme sosial yang tersembunyi untuk menciptakan ketundukan. Penggunaan bahasa metaforis tentang "bayangan" dan ketiadaan eksistensi mencerminkan apa yang ditemukan dalam penelitian Nensilanti et al. (2024) tentang bagaimana novel-novel dengan tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis untuk menghadirkan kritik terhadap praktik-praktik represif. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Barasa and Riyanto (2023) tentang bagaimana propaganda dan manipulasi informasi digunakan untuk membangun diskursus yang menguntungkan penguasa.

Berdasarkan teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penghapusan eksistensi sosial korban merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui berbagai institusi dan praktik sosial (Kebung, 2018). Hal ini sejalan

dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi kultural menjadi salah satu bentuk pembatasan ekspresi budaya dan identitas untuk menciptakan konsensus (Kebung, 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi dampak represi politik terhadap kehidupan personal dan sosial tokoh-tokohnya, termasuk hilangnya identitas kultural (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-10 menggambarkan dampak traumatis dari praktik penghilangan paksa yang menghilangkan bahkan ruang untuk berduka bagi keluarga korban. Penggunaan frasa "tidak ada kuburan" dan "tidak ada tempat untuk mengenang" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa tidak hanya menghapus keberadaan fisik korban tetapi juga menghilangkan ruang memorial dan proses berduka yang normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Metafora "angin yang berbisik tentang kehilangan" mencerminkan apa yang disebut Foucault sebagai bentuk dominasi yang beroperasi melalui praktik-praktik sosial yang menciptakan kekosongan dan ketidakpastian (Kebung 2018). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk realitas sosial yang menguntungkan penguasa (Barasa dan Riyanto 2023).

Penggambaran ketiadaan ruang memorial dalam data HP-10 ini sejalan dengan penelitian Nensilanti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis untuk menghadirkan kritik terhadap praktik-praktik represif yang menghilangkan hak-hak dasar manusia. Ketidadaan kuburan dan tempat mengenang mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan trauma kolektif melalui penghapusan ruang-ruang memorial. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa dan Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengawasan dan normalisasi untuk menciptakan ketundukan masyarakat melalui penghapusan ruang-ruang ekspresi kesedihan dan perlawanan.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, ketiadaan ruang memorial merupakan manifestasi dari mekanisme kekuasaan yang beroperasi untuk mengontrol dan mendisiplinkan individu melalui berbagai mekanisme sosial yang tersembunyi (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi kultural, termasuk pembatasan ruang memorial dan ekspresi duka, menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan konsensus dan ketundukan (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana represi politik berdampak pada kehidupan

personal dan sosial tokoh-tokohnya, termasuk hilangnya ruang-ruang memorial yang penting bagi proses penyembuhan trauma kolektif (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-11 menggambarkan praktik penghilangan paksa yang dilakukan dengan cara yang sistematis melalui manipulasi informasi dan penghapusan jejak administratif korban. Frasa "tidak pernah lagi mendengar kabar" dan "tidak ada catatan resmi" menunjukkan bagaimana aparat negara secara sengaja menghilangkan segala bentuk dokumentasi resmi tentang keberadaan korban. Penggunaan kata "dipindahkan" sebagai justifikasi menunjukkan apa yang disebut Foucault sebagai cara kekuasaan beroperasi melalui institusi untuk menciptakan "kebenaran" yang menguntungkan penguasa (Barasa and Riyanto 2023). Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk narasi yang melegitimasi tindakan represif (Kebung 2018).

Fenomena penghilangan jejak administratif yang digambarkan dalam data HP-11 ini berkorelasi dengan penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menganalisis bagaimana propaganda media dan manipulasi informasi digunakan untuk membangun diskursus politik yang menguntungkan penguasa. Ketiadaan catatan resmi dan informasi yang ambigu tentang "pemindahan" korban mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif terus bertransformasi menjadi bentuk yang lebih sistemik dan birokratis. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nensilanti et al. (2024) yang menunjukkan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis untuk mengkritik praktik-praktik manipulasi administratif yang digunakan untuk menutupi kejahatan negara.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penghilangan catatan resmi merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui berbagai institusi dan praktik sosial untuk menciptakan ketidakpastian dan ketundukan (Kebung 2018). Hal ini diperkuat dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi institusional melalui kebijakan dan regulasi pembatas digunakan sebagai alat untuk menciptakan konsensus (Kebung 2018). Analisis ini juga sejalan dengan teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami teks sastra dalam hubungannya dengan konteks sejarah dan politik, di mana praktik penghilangan dokumen resmi menjadi bagian dari strategi sistematis untuk menghapus jejak pelanggaran HAM dari catatan sejarah (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-12 menggambarkan dampak mendalam dari praktik penghilangan paksa yang menciptakan ketidakpastian permanen bagi keluarga korban. Penggunaan frasa "tidak ada kuburan" dan "tidak ada petunjuk" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa dirancang untuk menghapus segala bentuk jejak fisik dan bukti keberadaan korban. Kata

"menduga" dan "lenyap selamanya" mencerminkan kondisi ketidakpastian abadi yang harus dihadapi keluarga korban, sesuai dengan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi untuk menciptakan ketidakpastian yang melumpuhkan (Barasa and Riyanto 2023). Praktik ini menunjukkan bagaimana represi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menciptakan trauma psikologis berkelanjutan (Kebung 2018).

Ketiadaan bukti fisik dan petunjuk yang digambarkan dalam data HP-12 ini sejalan dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan ketidakhadiran fisik untuk menggambarkan dampak mendalam dari praktik penghilangan paksa. Kondisi "menduga" dan ketidakpastian yang dialami keluarga korban mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan trauma kolektif melalui penghapusan bukti-bukti fisik. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui penciptaan ketidakpastian untuk mempertahankan dominasi.

Berdasarkan teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, ketiadaan bukti fisik dan petunjuk merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang beroperasi untuk mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat melalui ketidakpastian (Kebung, 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga melalui penciptaan kondisi ketidakpastian untuk menciptakan ketundukan (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan bagaimana penghilangan bukti fisik dan petunjuk menjadi bagian dari strategi penghapusan sejarah yang berdampak pada kehidupan personal dan sosial korban serta keluarganya (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-13 menggambarkan dampak sosial yang mendalam dari praktik penghilangan paksa yang berusaha menghapus eksistensi korban dari memori kolektif masyarakat. Penggunaan frasa "hanya tinggal bisikan" dan "seolah mereka tak pernah ada" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa tidak hanya menghilangkan keberadaan fisik tetapi juga berusaha menghapus jejak sosial dan ingatan tentang korban. Metafora "bisikan" mencerminkan bagaimana keluarga korban dipaksa untuk meredam kesedihan dan pencarian mereka, sesuai dengan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui praktik-praktik sosial yang membungkam dan menormalkan ketiadaan (Kebung 2018). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk realitas sosial yang menguntungkan penguasa (Barasa and Riyanto 2023).

Penghapusan eksistensi sosial yang digambarkan dalam data HP-13 ini sejalan dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel dengan tema represi politik menggunakan teknik narasi berlapis untuk menggambarkan proses sistematis penghapusan ingatan kolektif. Pembungkaman dan pengerdilan eksistensi korban menjadi "bisikan" mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif mentransformasi ruang publik menjadi ruang ketakutan dan kebungkaman. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana propaganda dan manipulasi informasi digunakan untuk menghapus narasi-narasi yang bertentangan dengan kepentingan penguasa.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penghapusan eksistensi sosial korban merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui berbagai institusi dan praktik sosial untuk menciptakan "kebenaran" yang menguntungkan penguasa (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi kultural, termasuk pembatasan ekspresi dan identitas, menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan konsensus dan ketundukan dalam masyarakat (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan bagaimana represi politik berdampak pada hilangnya identitas kultural dan menciptakan trauma kolektif dalam masyarakat (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-14 menggambarkan strategi sistematis dalam praktik penghilangan paksa yang menghapus segala bentuk bukti fisik keberadaan korban. Penggunaan frasa "tidak ada jejak, tidak ada bukti" menunjukkan bagaimana penghilangan paksa dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dokumentasi dan pembuktian. Klausa "kenangan yang semakin memudar setiap tahun" mencerminkan dampak temporal dari penghilangan paksa, di mana waktu menjadi alat yang menggerus ingatan dan harapan, sesuai dengan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme yang tersembunyi untuk menciptakan kelupaan sistematis (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk realitas yang menguntungkan penguasa (Barasa and Riyanto 2023).

Penghapusan bukti dan jejak yang digambarkan dalam data HP-14 ini berkorelasi dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan absennya bukti fisik sebagai metafora untuk menggambarkan upaya sistematis penghapusan sejarah. Proses memudarnya kenangan mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan amnesia kolektif

melalui penghapusan bukti-bukti fisik dan dokumentasi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui manipulasi informasi dan penghapusan jejak untuk mempertahankan narasi dominan.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, ketiadaan jejak dan bukti merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui pengawasan dan normalisasi untuk menciptakan kebenaran yang menguntungkan penguasa (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi institusional bekerja melalui penghapusan bukti-bukti fisik untuk menciptakan konsensus dan ketundukan dalam masyarakat (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi dampak represi politik terhadap hilangnya dokumentasi sejarah dan menciptakan trauma kolektif dalam masyarakat (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-15 menggambarkan kontras antara upaya aktif keluarga korban dalam pencarian dan sikap diam sistematis dari aparatus negara. Frasa "keluarga mencari ke mana-mana" dan "negara membisu" menciptakan pertentangan yang menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara keluarga korban dan institusi negara. Metafora "lubang hitam sejarah" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui kebisuan institusional untuk menciptakan kekosongan sistematis dalam narasi resmi (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam membentuk "kebenaran" melalui kebisuan yang terorganisir (Barasa and Riyanto 2023).

Kebisuan negara yang digambarkan dalam data HP-15 ini sejalan dengan penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menganalisis bagaimana propaganda dan manipulasi informasi digunakan untuk membangun diskursus politik yang menguntungkan penguasa. Metafora "lubang hitam sejarah" mencerminkan temuan (Kebung 2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan kekosongan sistematis dalam catatan sejarah melalui kebisuan institusional. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menunjukkan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan kontras antara pencarian keluarga dan kebisuan negara untuk mengkritik praktik-praktik penghilangan paksa.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, kebisuan negara merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui berbagai institusi untuk menciptakan ketidakpastian dan ketundukan (Kebung 2018). Hal ini sejalan

dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi institusional bekerja melalui kebijakan dan regulasi pembatas untuk menciptakan konsensus melalui kebisuan yang terorganisir (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi dampak kebisuan institusional terhadap kehidupan personal dan sosial korban serta keluarganya (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-16 menggambarkan dampak temporal dari praktik penghilangan paksa yang menggerus harapan keluarga korban secara perlahan. Penggunaan metafora "harapan mengering seperti daun yang tersentuh musim kemarau" menunjukkan proses gradual memudarnya optimisme dan harapan keluarga korban seiring berjalannya waktu. Frasa "tahun demi tahun berlalu" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui waktu untuk menciptakan normalisasi ketidakhadiran dan penerimaan atas ketidakpastian (Kebung 2018). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif dalam bentuk fisik tetapi juga produktif dalam membentuk resignasi psikologis (Barasa and Riyanto 2023).

Proses memudarnya harapan yang digambarkan dalam data HP-16 ini berkorelasi dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan metafora alam untuk menggambarkan dampak psikologis jangka panjang dari penghilangan paksa. Penggunaan metafora "musim kemarau" mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan erosi psikologis yang sistematis terhadap harapan dan resistensi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui waktu untuk menciptakan normalisasi ketidakhadiran.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, proses mengering dan memudarnya harapan merupakan manifestasi dari mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui waktu untuk mengontrol dan mendisiplinkan individu (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi psikologis bekerja melalui intimidasi dan pengucilan sosial untuk menciptakan ketundukan dalam masyarakat (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi dampak temporal dari represi politik terhadap kehidupan personal dan sosial korban serta keluarganya (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-17 menggambarkan bentuk perlawanan terhadap praktik penghilangan paksa melalui upaya dokumentasi alternatif oleh organisasi masyarakat sipil. Frasa "terus

berjuang" dan "mencatat nama-nama" menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melawan penghapusan sejarah yang dilakukan negara. Klausula "terhapus dari catatan resmi" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui penghapusan dokumentasi resmi, sementara muncul counter-power dalam bentuk pencatatan alternatif (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk resistensi yang terorganisir (Barasa and Riyanto 2023).

Upaya dokumentasi alternatif yang digambarkan dalam data HP-17 ini sejalan dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menghadirkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap praktik penghapusan sejarah. Peran Komisi Orang Hilang mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana masyarakat sipil menciptakan mekanisme counter-memory untuk melawan praktik-praktik represif negara. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil berperan dalam membangun narasi tandingan terhadap diskursus resmi negara.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, upaya pencatatan alternatif oleh Komisi Orang Hilang merupakan manifestasi dari resistensi terhadap mekanisme kekuasaan yang berusaha menghapus jejak korban (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat menciptakan counter-hegemony melalui dokumentasi dan advokasi (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi peran organisasi masyarakat sipil dalam melawan praktik-praktik represif dan mempertahankan memori kolektif (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-18 menggambarkan dampak emosional berkelanjutan dari praktik penghilangan paksa melalui objek-objek personal yang tersisa. Frasa "foto-foto usang" dan "senyum yang kini hanya kenangan" menunjukkan bagaimana benda-benda personal menjadi penghubung terakhir dengan korban yang hilang. Penggunaan kata "menatap" dan "mencari jawaban" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan menciptakan ketidakpastian yang membuat keluarga terus mencari makna dari fragmen-fragmen yang tersisa (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana penghilangan paksa tidak hanya berdampak pada hilangnya fisik seseorang tetapi juga menciptakan trauma berkelanjutan melalui ketidaklengkapan informasi (Barasa and Riyanto 2023).

Penggunaan foto sebagai penanda memori yang digambarkan dalam data HP-18 ini sejalan dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan objek-objek personal untuk menggambarkan dampak emosional dari kehilangan. Tindakan menatap foto mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan kondisi di mana keluarga korban hanya bisa bergantung pada memorabilia untuk mempertahankan ingatan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana foto-foto dan benda personal menjadi bukti eksistensial melawan upaya penghapusan sistematis oleh kekuasaan.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penggunaan foto sebagai penanda memori merupakan manifestasi dari resistensi terhadap mekanisme kekuasaan yang berusaha menghapus jejak korban (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana benda-benda personal dapat menjadi alat counter-hegemony dalam mempertahankan narasi personal melawan narasi dominan (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi peran objek-objek personal dalam mempertahankan memori dan identitas korban di tengah upaya penghapusan sistematis (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-19 menggambarkan bagaimana negara secara sistematis menciptakan mekanisme penghilangan yang sempurna. Penggunaan metafora "lubang hitam" dan frasa "tersedot, tanpa jejak, tanpa suara" menunjukkan bagaimana apparatus negara bekerja untuk menghapus secara total eksistensi korban. Penggunaan kata "menciptakan" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan secara aktif dan sengaja membangun sistem untuk menghilangkan jejak-jejak korban (Kebung 2018). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif dalam menciptakan mekanisme penghapusan sistematis (Barasa and Riyanto 2023).

Penggambaran negara sebagai pencipta mekanisme penghilangan dalam data HP-19 ini sejalan dengan penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi melalui aparatus negara untuk menciptakan diskursus yang menguntungkan penguasa. Metafora "lubang hitam" mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan kekosongan sistematis dalam catatan sejarah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menunjukkan bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan metafora kosmologis untuk

menggambarkan kekuatan destruktif dari mekanisme penghilangan paksa yang dilakukan negara.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penciptaan "lubang hitam" oleh negara merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi melalui institusi untuk menciptakan ketidakpastian dan ketundukan (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi institusional bekerja melalui kebijakan dan regulasi pembatas untuk menciptakan konsensus melalui penghapusan sistematis (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi peran negara dalam menciptakan mekanisme penghapusan yang berdampak pada kehidupan personal dan sosial korban (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-20 menggambarkan proses gradual memudarnya harapan keluarga korban seiring berjalannya waktu. Penggunaan metafora "bayangan yang perlahan menghilang" dan "ujung lorong sejarah" menunjukkan bagaimana faktor waktu menjadi alat yang menggerus optimisme dan harapan akan ditemukannya korban. Frasa "harapan semakin tipis" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui dimensi temporal untuk menciptakan normalisasi ketidakhadiran (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana waktu menjadi instrumen kekuasaan yang efektif dalam menciptakan penerimaan atas ketidakpastian (Barasa and Riyanto 2023).

Proses memudarnya harapan yang digambarkan dalam data HP-20 ini sejalan dengan penelitian Nensilanti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan metafora visual untuk menggambarkan dampak temporal dari penghilangan paksa. Penggunaan metafora "lorong sejarah" mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan erosi harapan yang sistematis melalui berjalannya waktu. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui waktu untuk menciptakan normalisasi ketidakhadiran dan penerimaan atas ketidakpastian.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, proses memudarnya harapan merupakan manifestasi dari mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui waktu untuk mengontrol dan mendisiplinkan individu (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi psikologis bekerja melalui intimidasi dan pengucilan sosial yang berkelanjutan untuk menciptakan ketundukan dalam masyarakat (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New

Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi dampak temporal dari represi politik terhadap kehidupan personal dan sosial korban serta keluarganya (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-21 menggambarkan totalitas penghilangan paksa melalui metafora kosmologis yang kuat. Penggunaan perbandingan "seperti bintang-bintang tertelan kegelapan malam" dan frasa "tak meninggalkan cahaya" menunjukkan bagaimana korban penghilangan paksa dilenyapkan tanpa meninggalkan jejak apapun. Metafora ini mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi untuk menciptakan kekosongan total dalam narasi sosial dan sejarah (Kebung 2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana penghilangan paksa dirancang untuk menghapus tidak hanya keberadaan fisik tetapi juga jejak eksistensial korban (Barasa and Riyanto 2023).

Penggunaan metafora astronomi dalam data HP-21 ini sejalan dengan penelitian Nensilanti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan metafora alam untuk menggambarkan skala dan totalitas penghilangan paksa. Perbandingan dengan bintang yang tertelan kegelapan mencerminkan temuan (Kebung 2018) tentang bagaimana praktik-praktik represif menciptakan kekosongan sistematis dalam memori kolektif. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui penghapusan total untuk menciptakan ketidakhadiran yang sempurna.

Merujuk pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, penghilangan total yang digambarkan melalui metafora bintang merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang beroperasi untuk menciptakan ketiadaan absolut (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana represi institusional bekerja melalui penghapusan sistematis untuk menciptakan konsensus melalui ketiadaan (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra menggunakan metafora untuk mengeksplorasi dampak total dari praktik penghilangan paksa terhadap memori kolektif masyarakat (Ridwan et al. 2023).

Kutipan HP-22 menggambarkan paradoks dari upaya dokumentasi korban penghilangan paksa. Frasa "daftar nama terus bertambah" dan metafora "memorial diam yang berteriak tanpa suara" menunjukkan kontradiksi antara akumulasi dokumentasi dan kebisuan institusional terhadap kasus-kasus ini. Penggunaan oksimoron "berteriak tanpa suara" mencerminkan apa yang dijelaskan Foucault tentang bagaimana kekuasaan menciptakan situasi di mana kebenaran tetap ada namun tidak bisa disuarakan secara terbuka (Kebung

2018). Praktik ini menunjukkan bagaimana upaya dokumentasi menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap praktik penghilangan paksa yang sistematis (Barasa and Riyanto 2023).

Peran dokumentasi sebagai memorial yang digambarkan dalam data HP-22 ini sejalan dengan penelitian Nensilianti et al. (2024) yang menganalisis bagaimana novel-novel bertema represi politik menggunakan paradoks untuk menggambarkan perjuangan melawan praktik penghilangan paksa. Akumulasi daftar nama mencerminkan temuan Kebung (2018) tentang bagaimana masyarakat sipil menciptakan counter-memory untuk melawan praktik-praktik represif negara. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Barasa and Riyanto (2023) yang menjelaskan bagaimana dokumentasi menjadi bentuk resistensi terhadap upaya penghapusan sistematis oleh kekuasaan.

Mengacu pada teori Kekuasaan Michel Foucault dalam dokumen bentuk represi, pencatatan nama-nama korban merupakan manifestasi dari resistensi terhadap mekanisme kekuasaan yang berusaha menghapus jejak korban (Kebung 2018). Hal ini sejalan dengan perspektif teori Hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat menciptakan counter-hegemony melalui dokumentasi dan memorial (Kebung 2018). Analisis ini juga diperkuat oleh teori New Historicism Stephen Greenblatt yang menekankan pentingnya memahami bagaimana teks sastra mengeksplorasi peran dokumentasi dalam mempertahankan memori kolektif dan melawan praktik-praktik represif (Ridwan et al. 2023).

5.2 Implikasi Represi Politik dalam Novel *Laut Bercerita* Karya Laila S.Chudori Terhadap Pembelajaran Sastra di Sekolah

Implikasi pembelajaran merupakan keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan dalam proses belajar mengajar. Menurut Sanjaya (2019:13), implikasi pembelajaran adalah konsekuensi logis yang harus dijalankan guru dan peserta didik sebagai akibat dari penggunaan pendekatan, metode, atau strategi tertentu dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran sastra, implikasi merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan dari pengkajian karya sastra terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Pembelajaran sastra di sekolah memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pengembangan literasi siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2021:456), pembelajaran sastra tidak hanya bertujuan mengembangkan kompetensi kesastraan, tetapi juga membangun kepekaan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori yang mengangkat tema represi politik memiliki potensi besar untuk

dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra di sekolah. Namun dalam analisis represi politik tidak serta merta digunakan dalam pembelajaran. Diperlukan pembatasan tema karena hal ini merupakan isu sensitif yang terjadi masa pemerintahan orde baru. Peserta didik diberikan tema yang lebih umum tentang kehidupan sosial, nilai kemanusiaan, dan demokrasi bernegara.

Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat represi politik dalam karya sastra, menurut Faruk (2020:78), merupakan penggambaran berbagai bentuk penindasan dan pembatasan kebebasan yang dilakukan oleh kekuatan politik dominan terhadap individu atau kelompok masyarakat. Pengkajian tema represi politik dalam novel *Laut Bercerita* dapat memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang dinamika sosial politik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sukristanto (2022:34) menyatakan bahwa pembelajaran sastra berbasis isu sosial politik kontemporer dapat meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial di sekitar mereka. Melalui pengkajian novel *Laut Bercerita*, siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap persoalan-persoalan sosial politik yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran sastra yang dikemukakan oleh Ismawati (2023:67) yaitu mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai intelektual, emosional, sosial, dan religius.

Dalam implementasinya, pembelajaran novel *Laut Bercerita* di sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Endraswara (2021:145) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sastra, di mana siswa diajak untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong siswa menganalisis hubungan antara peristiwa dalam novel dengan realitas sosial politik kontemporer.

Evaluasi pembelajaran juga menjadi aspek krusial dalam pengkajian novel *Laut Bercerita*. Prakoso (2023:89) mengusulkan model evaluasi pembelajaran sastra yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan afektif siswa. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti analisis kritis, diskusi kelompok, dan refleksi personal siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam novel.

Dengan demikian, implikasi represi politik dalam novel *Laut Bercerita* terhadap pembelajaran sastra di sekolah mencakup aspek pengembangan literasi kritis, pemahaman konteks sosial politik, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan

pembelajaran yang tepat dan evaluasi yang komprehensif, novel ini dapat menjadi sumber belajar yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran sastra di sekolah.

4.2.1 Identitas Pembelajaran

Identitas pembelajaran merupakan ciri khusus yang dapat menunjukkan secara jelas manfaat penelitian dalam pembelajaran. Artinya pemanfaatan kajian ini hanya berlaku untuk kegiatan pembelajaran di SMA kelas XII dengan mata pelajaran khusus Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut uraian dari identitas pembelajaran yang dijadikan sasaran dari pemanfaatan kajian ini.

Tabel 5. 1 Identitas Pembelajaran

Satuan pendidikan	SMA
Kelas/ semester	XII/Genap
Mata pelajaran	Bahasa Indonesia
Kompetensi inti	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian nyata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajari di sekolah secara mandiri.
Kompetensi dasar	4.12 Menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan maupun tulisan.
Indikator	4.12.1 Menyusun kritik terhadap karya sastra. 4.12.2 Menyusun esai terhadap suatu objek atau permasalahan. 4.12.3 Mempresentasikan, menanggapi, dan menyunting kritik dan esai yang telah ditulis.

Alokasi waktu	8× 45 menit (4 pertemuan)
---------------	---------------------------

4.2.2 Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran sastra yang dikembangkan dari kajian novel *Laut Bercerita* dapat difokuskan pada konsep kritik sastra, struktur kritik sastra, serta penulisan esai kritis. Menurut Pradopo (2023:45), kritik sastra merupakan bidang studi sastra yang berupaya menghakimi karya sastra untuk menentukan nilai hakiki karya sastra, baik dari segi intrinsik maupun ekstrinsik.

Pembelajaran kritik sastra menjadi penting karena membantu siswa mengembangkan kemampuan analitis dan evaluatif terhadap karya sastra. Wellek dan Warren dalam Jabrohim (2021:89) mengemukakan bahwa kritik sastra memiliki tiga fungsi utama: menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra. Dalam konteks novel *Laut Bercerita*, siswa dapat belajar mengaplikasikan pendekatan kritik sosial-politik untuk menganalisis bagaimana karya ini merepresentasikan isu-isu represi politik.

Struktur kritik sastra, sebagaimana dijelaskan oleh Sugihastuti (2022:156), terdiri dari beberapa komponen penting: pengantar yang memuat informasi umum tentang karya, sinopsis, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Pemahaman terhadap struktur ini membantu siswa mengorganisasi pemikiran kritisnya secara sistematis ketika mengkaji karya sastra. Melalui pengkajian novel *Laut Bercerita*, siswa dapat mempraktikkan bagaimana mengembangkan kritik yang terstruktur dan komprehensif.

Adapun esai, menurut Nurgiyantoro (2023:123), merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ciri-ciri esai yang dijelaskan oleh Atmazaki (2021:67) meliputi: (1) bersifat argumentatif, (2) menggunakan bahasa yang lugas dan komunikatif, (3) memiliki sudut pandang personal yang kuat, (4) fokus pada satu topik bahasan, dan (5) disajikan secara sistematis. Dalam konteks pembelajaran, siswa dapat mengembangkan esai kritis tentang berbagai aspek dalam novel *Laut Bercerita*, seperti representasi kekuasaan, perjuangan HAM, atau dampak represi politik terhadap individu dan masyarakat.

Kerangka pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk tidak hanya memahami konsep teoretis kritik sastra, tetapi juga mempraktikkan keterampilan menulis kritis melalui pengkajian novel yang relevan dengan konteks sosial-politik kontemporer. Seperti yang dikemukakan oleh Faruk (2023:234), pembelajaran kritik sastra yang efektif

harus mampu mengintegrasikan pemahaman teoretis dengan praktik analisis terhadap karya sastra konkret.

Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui penugasan penulisan esai kritis yang menganalisis aspek-aspek tertentu dalam novel *Laut Bercerita*. Endraswara (2022:178) menyarankan bahwa penilaian esai kritis siswa sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek: kedalaman analisis, keterkaitan dengan konteks sosial-politik, penggunaan teori yang relevan, dan kemampuan berargumentasi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya mengembangkan pemahaman konseptual siswa, tetapi juga keterampilan praktis dalam menganalisis dan menulis tentang karya sastra.

1) Sinopsis Novel Laut Bercerita Karya Laila S.Chudori, 2) Kritik Sastra Bertema Kehidupan Sosial Politik dan Nilai-nilai Kemanusiaan Novel Laut Bercerita Karya Laila S.Chudori, 3) Esai Sastra Bertema Kehidupan Sosial Politik dan Nilai-nilai Kemanusiaan Novel Laut Bercerita Karya Laila S.Chudori.

1) Sinopsis Novel Laut Bercerita Karya Laila S.Chudori

Laut Bercerita adalah sebuah novel karya Laila S. Chudori yang mengisahkan perjuangan, cinta, dan pengorbanan dalam latar belakang kekerasan rezim Orde Baru di Indonesia. Novel ini mengikuti perjalanan hidup tokoh utama, Laut seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang berjuang melawan ketidakadilan dan represi politik. Laut terlibat dalam gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk menggulingkan rezim otoritarian yang telah lama menindas rakyat.

Kisah ini diceritakan melalui dua sudut pandang: pertama, melalui Laut Biru Simbolon yang mengisahkan pengalaman langsungnya sebagai tahanan politik yang mengalami penyiksaan dan penghilangan paksa; dan kedua, melalui Asmara Jati, saudara perempuan Laut, yang merepresentasikan sudut pandang keluarga yang mencari keadilan dan jawaban atas kehilangan anggota keluarga mereka.

Laut dan rekan-rekannya dikhianati dan ditangkap oleh aparat militer. Selama di penjara, Laut menghadapi berbagai bentuk penyiksaan fisik dan mental. Novel ini mengungkapkan kekejaman yang dialami para tahanan politik pada masa itu, termasuk penghilangan paksa, di mana banyak dari mereka tidak pernah ditemukan kembali. Cerita bergeser ke perspektif Asmara Jati yang bersama keluarganya berjuang mencari kepastian nasib Laut dan rekan-rekannya yang hilang. Bagian ini menunjukkan dampak psikologis dan sosial dari praktik penghilangan paksa terhadap keluarga dan masyarakat.

Dengan gaya bahasa yang puitis dan emosional, Laila S. Chudori menyajikan narasi yang menggugah tentang keberanian dan kemanusiaan di tengah kegelapan. Novel ini tidak

hanya menjadi pengingat akan sejarah kelam Indonesia tetapi juga menjadi seruan bagi pembaca untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. *Laut Bercerita* adalah sebuah karya yang tidak hanya berbicara tentang individu tetapi juga menggambarkan dinamika sosial dan politik sebuah bangsa.

2) Kritik Sastra Bertema Kehidupan Sosial Politik dan Nilai-nilai Kemanusiaan Novel

Laut Novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori menghadirkan kritik tajam terhadap kehidupan sosial politik Indonesia di bawah rezim Orde Baru, khususnya melalui represi yang dialami para aktivis mahasiswa. Cerita ini menggambarkan bagaimana kekuasaan otoritarian menggunakan strategi sistematis seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa untuk menekan perlawanan rakyat. Tokoh Laut Biru Simbolon menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus cerminan dari banyaknya korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu. Melalui narasinya, novel ini secara gamblang menyuarakan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan yang dilegitimasi oleh struktur politik.

Dari perspektif sosiologi sastra, pendekatan Alan Swingewood membantu memahami bagaimana novel ini merefleksikan realitas sosial politik. Swingewood berargumen bahwa sastra berfungsi sebagai medium untuk mengungkapkan ketegangan antara individu dan struktur sosial. Dalam *Laut Bercerita*, ketegangan ini tampak jelas melalui perjuangan Laut Biru melawan represi negara dan upaya keluarganya untuk mencari kebenaran atas penghilangan dirinya. Dengan menempatkan isu penghilangan paksa dalam konteks sejarah dan keluarga, novel ini menyoroti dampak yang meluas dari praktik kekerasan negara terhadap individu dan komunitas.

Selain kritik sosial politik, novel ini juga menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keberanian, solidaritas, dan perjuangan untuk keadilan. Persahabatan dan kerja sama antara Laut dan rekan-rekannya menggambarkan pentingnya solidaritas dalam menghadapi kekuatan represif. Di sisi lain, perjuangan Asmara Jati untuk menemukan keberadaan Laut mencerminkan pentingnya keadilan dan hak atas kebenaran bagi keluarga korban. Nilai-nilai ini menjadikan *Laut Bercerita* sebagai karya yang tidak hanya merekam sejarah kelam Indonesia, tetapi juga menawarkan inspirasi untuk menjaga kemanusiaan di tengah represi.

Dalam konteks global, novel ini menghubungkan pengalaman Indonesia dengan fenomena serupa yang terjadi di negara lain melalui istilah "Desaparasidos." Hal ini menunjukkan bahwa penghilangan paksa bukan hanya persoalan lokal tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang universal. Oleh karena itu, *Laut Bercerita* menjadi sebuah karya penting yang menyuarakan kesadaran kolektif terhadap perlunya

memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di masa lalu maupun masa kini.

3) Esai Sastra Bertema Kehidupan Sosial Politik dan Nilai-nilai Kemanusiaan Novel *Laut Bercerita* Karya Laila S.Chudori

Novel *Laut Bercerita* karya Laila S. Chudori adalah sebuah karya sastra yang menggugah kesadaran pembaca terhadap realitas sosial politik Indonesia pada masa Orde Baru. Melalui narasi yang kuat dan penuh emosi, novel ini tidak hanya mengisahkan pengalaman individu, tetapi juga menjadi cerminan kondisi sosial, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terabaikan dalam sejarah bangsa.

Kehidupan Sosial Politik dalam *Laut Bercerita*

Latar cerita yang diambil dari masa rezim Orde Baru menempatkan *Laut Bercerita* sebagai refleksi nyata dari represi politik pada era tersebut. Novel ini menggambarkan represi negara terhadap gerakan mahasiswa melalui penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Tokoh Laut Biru Simbolon menjadi simbol perjuangan mahasiswa yang melawan ketidakadilan dan penindasan demi terciptanya perubahan sosial. Namun, perjuangannya berakhir tragis ketika ia dan rekan-rekannya menjadi korban penghilangan paksa. Kisah ini mencerminkan bagaimana kekuasaan otoritarian menggunakan kekerasan sistematis untuk menumpas perlawanan dan mempertahankan stabilitas semu.

Pendekatan Laila dalam menyusun narasi ini tidak hanya merefleksikan fakta sejarah, tetapi juga menghadirkan kritik terhadap sistem politik yang menormalisasi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka teori sosiologi sastra Alan Swingewood, *Laut Bercerita* berfungsi sebagai medium yang menggambarkan ketegangan antara individu dan struktur sosial yang represif. Narasi ini mengangkat suara mereka yang terpinggirkan dalam sejarah resmi, memberikan perspektif baru tentang bagaimana kekuasaan beroperasi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam *Laut Bercerita*

Selain menjadi kritik sosial politik, *Laut Bercerita* juga sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan perjuangan melawan ketidakadilan. Keberanian Laut dan teman-temannya dalam menghadapi ancaman rezim menjadi simbol kekuatan moral yang melampaui rasa takut. Solidaritas di antara para aktivis menunjukkan betapa pentingnya kerja sama dalam memperjuangkan kebebasan. Di sisi lain, perjuangan Asmara Jati, saudara

perempuan Laut, untuk menemukan kebenaran mencerminkan nilai keadilan dan hak atas kebenaran yang menjadi hak dasar setiap manusia.

Melalui narasi ini, Laila menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga meluas ke keluarga dan masyarakat. Penderitaan yang dialami keluarga Laut mencerminkan trauma kolektif yang dihasilkan oleh praktik penghilangan paksa. Novel ini menegaskan pentingnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk melawan kekuatan yang mengancam integritas dan martabat manusia.

Relevansi dengan Kondisi Kontemporer

Meskipun berlatar sejarah, tema-tema dalam *Laut Bercerita* tetap relevan dalam konteks sosial politik masa kini. Isu penghilangan paksa dan pelanggaran HAM masih menjadi permasalahan global yang memerlukan perhatian serius. Novel ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebebasan adalah tugas yang harus terus dilanjutkan oleh setiap generasi.

Dengan menggunakan istilah internasional seperti "Desaparasidos," *Laut Bercerita* menghubungkan pengalaman Indonesia dengan fenomena serupa di negara lain, seperti di Amerika Latin. Hal ini menempatkan novel ini dalam konteks universal perjuangan hak asasi manusia, memperkuat pesan bahwa pelanggaran kemanusiaan di satu tempat adalah ancaman bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Laut Bercerita adalah lebih dari sekadar cerita tentang pengorbanan dan perjuangan; ia adalah sebuah peringatan terhadap bahaya otoritarianisme dan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kritik sosial politik dan pengangkatan nilai-nilai seperti keberanian, solidaritas, dan keadilan, novel ini menjadi karya sastra yang tidak hanya merekam sejarah tetapi juga menggugah kesadaran pembaca untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil. Novel ini mengingatkan bahwa sastra memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran, menciptakan empati, dan memperjuangkan nilai-nilai universal yang menjadi fondasi peradaban manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, I. R. 2019. *Teori-Teori Kesusastaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barasa, Martinus, and F. X. Armada Riyanto. 2023. "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault Atas Propaganda Media Dalam Membangun Diskursus Politik." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6(1):188–95. doi: 10.34007/jehss.v6i1.1785.
- Bressler, C. E. 2015. *Literary Theory: An Introduction*. New York: St. Martin's Press.
- Budianta, M. 2023. "Memory and Trauma in Contemporary Indonesian Literature." *Southeast Asian Studies* 12(2):67–89.
- Budiawan. 2018. "Breaking the Immortalized Past: Anti-Communist Discourse and Reconciliatory Politics in Post-Soeharto Indonesia." *Critical Asian Studies* 32(4):519–48.
- Chudori, L. S. 2024. *Laut Bercecerita*. Jakarta: KPG.
- Damono, Sapardi Djoko. 2020. *Sosiologi Sastra: Pengantar Ringkas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Drakos, K., and A. Gofas. 2016. "The Devil You Know but Are Afraid to Face: Underreporting Bias and Its Distorting Effects on the Study of Terrorism." *Journal of Conflict Resolution* 50(5):714–35.
- Eagleton, T. 2016. *Criticism and Ideology*. London: Verso.
- Endraswara, S. 2021. *Metode Pembelajaran Drama: Apresiasi, Ekspresi dan Pengkajian*. Yogyakarta: CAPS.
- Faruk. 2022. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goldmann L. 2016. *Towards a Sociology of the Novel*. London: Tavistock Publications.
- Handayani, C. S. 2023. "Reading Political Novels: The Impact on Social and Political Awareness." *Journal of Social Sciences and Humanities* 17(3):145–59.
- Handayani, C. S. 2024. "Authentic Assessment in Literature Learning: A Case Study in Higher Education." *Journal of Educational Research and Evaluation* 28(2):203–17.
- Henderson, J. 2019. "Political Repression and Social Control in Modern Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 50(3):325–45.
- Heryanto, A. 2014. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. London: Routledge.
- Ismawati, E. 2023. "Literature-Based Learning: Strategies and Challenges in Higher Education." *Journal of Language and Literature Education* 12(2):67–78.
- Jabrohim. 2021. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita.
- Kebung, Konrad. 2018. "Membaca 'Kusa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia." *Melintas* 33(1):34–51. doi: 10.26593/mel.v33i1.2953.34-51.
- Kusmayanti, A. M. 2018. *Sastra dan Kritik Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Kusuma, D. 2024. "Critical Literature Learning Model: A Case Study of Teaching Political Novels in Higher Education." *Journal of Language and Literature Education* 13(3):178–94.
- Kusumawati, A. 2023. "Narasi Kekerasan dalam Sastra Indonesia Kontemporer." *Jurnal Kritik Sastra* 10(2):89–102.
- Makaryk, I. R. 2016. *Encyclopedia of Contemporary Literary Theory*. Toronto: University of Toronto Press.
- maulina Ferizal, Tasha. 2024. "Represi Dan Resistensi Negara Dalam Novel Laut Bercecerita Karya Laila S. Chudori." 3(3).
- Nensilanti, Ridwan, and Dela Aprilya. 2024. "Dampak Kebijakan Fiskal Pada Kelas Bawah Dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya: Marxisme." *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6(1):165–79. doi: 10.19105/ghancaran.v6i1.13290.

- Nugroho, B. 2022. "Politik Identitas dalam Novel Gentayangan Karya Intan Paramaditha: Perspektif Poskolonial." *Jurnal Kritik Sastra Indonesia* 8(1):56–72.
- Nurhayati, E. 2024. "Engaging Students with Contemporary Novels: Strategies and Challenges." *Journal of Language and Literature Education* 14(2):156–69.
- Pratiwi, S. 2021. "Resistensi terhadap Kekuasaan dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari: Analisis Wacana Kritis." *Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya* 6(2):134–51.
- Pratiwi, S. 2023. "Innovative Approaches in Teaching Novels: A Comparative Study." *Journal of Language and Literature Education* 12(3):234–47.
- Prodopo, R. D. 2020. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, R. K. 2024. "Digital Platforms in Literature Learning: Opportunities and Challenges." *Journal of Language and Literature Education* 14(3):201–13.
- Rahmanto, B. 2018. *Metode Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ratna, N. K. 2023. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Jenifer Tiara Ridwan Tiara, Joseph Abner, Rahmadaniyah Aliyyawaly, and Dini Safitri. 2023. "Teori Relasi Kekuasaan Strata Sosial Masyarakat Dalam Novel Red Queen Karya Victoria Aveyard." *Sosietas* 12(2):111–22. doi: 10.17509/sosietas.v12i2.58685.
- Ritter, E. H., and C. R. Conrad. 2016. "Preventing and Responding to Dissent: The Observational Challenges of Explaining Strategic Repression." *American Political Science Review* 110(1):85–99.
- Sayuti, S. A. 2017. *Berkenalan dengan Prosa Fiksi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suryadi, M. 2024. "Socio-Political Issues in Contemporary Indonesian Novels: A Content Analysis." *Journal of Southeast Asian Literature* 20(1):156–69.
- Suryaman, M. 2024. "Effective Novel-Based Learning: A Systematic Review." *Journal of Language and Literature Education* 13(1):123–35.
- Swingewood, A. 2017. *The Novel and Society*. London: Routledge.
- Thung, J. L. 2017. *Sastra dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tyson, L. 2015. *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide*. New York: Routledge.
- Widodo, M. 2023. "Selecting Novels for Literature Learning: Criteria and Considerations." *Journal of Language and Literature Education* 12(1):89–101.
- Williams, R. 2023. *Culture and Society*. London: Penguin Books.
- Wiyatmi. 2022. "Criticism and Resistance in Post-Reformation Indonesian Literature." *Journal of Southeast Asian Literature* 18(1):34–47.